IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

165

LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PTUPT)

MEMBANGUN KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PADA KELOMPOK MARGINAL

TAHUN KE 2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Drs. TRI JOKO SRI HARYONO, M.Si	0021045804
Dr. PINKY SAPTANDARI ENDANG P. Dra., MA	0026055805
SITI MAS'UDAH, S.Sos.,M.Si	0005087908

DIBIAYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PTUPT)

KFB
KK-2
LP 61/19
Har
m

MEMBANGUN KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PADA KELOMPOK MARGINAL

TAHUN KE 2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Drs. TRI JOKO SRI HARYONO, M.Si	0021045804
Dr. PINKY SAPTANDARI ENDANG P. Dra., MA	0026055805
SITI MAS'UDAH, S.Sos.,M.Si	0005087908

DIBIAYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

HALAMAN PENGESAHAN

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Judul	: MEMBANGUN KERJA LAYAK PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PADA KELOMPOK MARGINAL
Peneliti/Pelaksana	
Nama Lengkap	: Drs TRI JOKO SRI HARYONO, M.Si
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga
NIDN	: 0021045804
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Program Studi	: Antropologi
Nomor HP	: 081230396394
Alamat surel (e-mail)	: trijoko.haryono@fisip.unair.ac.id
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: Dra PINKY SAPTANDARI ENDANG P
NIDN	: 0026055805
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: SITI MAS UDAH S.Sos, M.Si
NIDN	: 0005087908
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 100,000,000
Biaya Keseluruhan	: Rp 197,503,000

Mengetahui,
Dekan FISIP Unair

(Dr. Falih Suaedi,Drs.,M.Si)
NIP/NIK 196302261988101001

Kota Surabaya, 13 - 11 - 2018
Ketua,

(Drs TRI JOKO SRI HARYONO, M.Si)
NIP/NIK 195804211987031003

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR

(Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs.,M.Si.,Ph.D.)
NIP/NIK 196705071991021001

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RINGKASAN

Di Indonesia terdapat 2,6 juta orang yang menjadi pekerja rumah tangga (PRT), dari jumlah tersebut 90%-nya adalah PRT perempuan. Pekerjaan sebagai PRT adalah sumber penghasilan bagi perempuan, terutama perempuan pedesaan yang seringkali memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah, berasal dari daerah pedesaan miskin serta kesempatan kerja terbatas. Kehadiran PRT ini merupakan gejala umum untuk meingkatkan ekonomi bagi PRT, sehingga mereka datang ke kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang Raya. Mengingat kedua wilayah ini, juga berkembang pesat perumahan-perumahan baru.

Permasalahan yang sering muncul adalah tidak adanya PRT dalam memperoleh hak-hak dasar PRT seperti usia minimum bekerja, kondisi tempat kerja, batas waktu kerja, perlindungan dari kekerasan, waktu istirahat, waktu cuti, menu makanan, akses kesehatan, upah minimum, tidak memiliki organisasi dan kebijakan yang melindungi PRT.

Salah satu solusi terkait dengan permasalahan PRT tersebut, perlunya membangun kerja layak bagi PRT di Surabaya dan Malang Raya, mengingat dikedua lokasi tersebut sudah mulai merancang perlindungan PRT dan bentuk organisasinya. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi berbagai pihak termasuk pemerintah, dengan menciptakan kerja layak bagi PRT berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan hak-hak PRT sebagai manusia, perempuan dan buruh.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahapan yang digunakan adalah (1) penentuan Lokasi Penelitian : ditentukan secara *purposive* adalah Surabaya dan Malang Raya. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan Surabaya dan Malang Raya adalah a. warga Surabaya dan Malang Raya (kota Malang, kabupaten Malang dan kota Batu) sangat ketergantungan dengan PRT, b. banyak penduduk lain dari Surabaya dan Malang Raya, yang mengais rejeki ke Surabaya dan Malang Raya sebagai PRT, c. lokasi ini sangat pesat berkembang perumahan-perumahan baru, d.di kedua lokasi tersebut, sudah mulai merancang perlindungan PRT dan bentuk organisasinya. (2) Pengumpulan Data : (a) yang meliputi *observation* ; dan (b) *indepth interview*. (3) Informan : adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti, teknik (4) adalah Analisa Data : Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diindentifikasikan berdasarkan tema kemudian dianalisa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahwa akan menemukan formulasi seperti apa membangun Kerja Layak PRT (terutama di Jawa Timur) sehingga akan menentukan kebijakan model apa yang paling tepat untuk dalam rangka perlindungan pada kelompok marginal.

Kata Kunci : Kerja Layak, Kelompok Marginal, Kebijakan

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

PRAKATA

Dengan mengucap syukur Alhamdullillah kepada Allah SWT, bahwa laporan akhir penelitian yang berjudul **"Membangun Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) Sebagai Upaya Perlindungan Pada Kelompok Marginal"** telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sesungguhnya banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim peneliti di lapangan dalam pengumpulan data, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Kesulitan yang dihadapi meliputi prosedur ijin penelitian ke instansi-instansi pemerintah.

Meskipun demikian, banyak pihak-pihak yang telah ikut membantu menyelasaikan masalah di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan untuk itu pula atas nama tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Lembaga Penelitian dan Inovasi UNAIR, Prof. H. Hery Purnobasuki, Drs.,M.Si.,Ph.D serta seluruh staf LPI Universitas Airlangga,, atas dukungan fasilitas dan administrasi yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini.
2. Instansi dan dinas-dinas pemerintah seperti JALA-PRT, ILO Surabaya, dan instansi pemerintah meliputi UPTP3TKI, Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKBPM, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, yang terkait dengan program-program perlindungan PRT yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk FGD dan *indepth interview* dalam proses penelitian ini.
3. Lembaga dan jaringan PRT seperti LPKP Malang, WCC Dian Mutiara dan KPPD yang memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan PRT di Surabaya dan Malang Raya.
4. Umu Hilmy, SH, MS dan Sri Wahyuningsih, SH, MS selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan masukan dan membantu dalam pengelolahan data di lapangan.
5. Saudari dra. Sutiah selaku direktur LPKP Malang yang telah memberikan waktunya dalam pencarian data dan membantu dalam menganalisa data di lapangan.
6. Seluruh informan PRT beserta keluarganya yang bersedia kami wawancarai dan didokumentasikan dalam penulisan ini.

Atas segala bantuan dan pengorbanannya dalam membantu Tim Peneliti selama berada di lapangan dalam pengumpulan data, sekali lagi atas nama Tim Peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Walaupun hasil ini jauh dari kesempurnaan dalam laporan penelitian ini, tetapi kami yakin bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi instansi pemerintah, LSM, dunia pendidikan. Di akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, kami akan memperbaiki penelitian ini.

Surabaya, November 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HAL PENGESAHAN....1
RINGKASAN....2
PRAKATA....3
DAFTAR ISI....5
PENDAHULUAN....6
1.1. Latar Belakang Penelitian....6
1.2. Perumusan Masalah....10
TINJAUAN PUSTAKA....11
Konsep Kemiskinan....11
Konsep Kebijakan....13
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN....15
3.1 Tujuan Penelitian....15
3.2 Manfaat Penelitian....17
METODE PENELITIAN....19
4.1 Penentuan Lokasi Penelitian....19
4.2 Pengumpulan Data....20
Pengamatan atau *Observation*....20
Wawancara Mendalam atau *indepth interview*....20
4.3 Informan....21
4.4 Analisa Data....23
4.5 Indikator Capaian Tahunan....23
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI....25
5.1 Keberadaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan....25
5.2 Model Pemantauan Berbasis Komunitas (PBK) Dalam Relasi PRT Dengan Majikan....27
5.3 Pilihan Perempuan menjadi PRT/PRTA....32
5.4 Minimnya Perlindungan Terhadap PRT/PRTA....34
KESIMPULAN DAN SARAN....37
Kesimpulan....37
Saran....38
DAFTAR PUSTAKA....39
LAMPIRAN....40

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penelitian dengan judul Membangun Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT) Sebagai Upaya Perlindungan Pada Kelompok Marginal, temuan terpenting **pada tahun pertama** bahwa sebagian besar PRT di Surabaya dan Malang Raya berjenis kelamin perempuan, bukan kebetulan, tetapi karena mereka hidup dalam masyarakat dengan sistem budaya patriarki, sehingga lebih banyak perempuan bekerja di sektor domistik daripada laki-laki. PRT di Surabaya umumnya berasal dari daerah pedesaan seperti Bojonegoro, Blitar, Nganjuk, Ponorogo, dan Kediri. Beberapa kecamatan di Kabupaten dan Kota Malang menjadi daerah pemasok pembantu rumah tangga di wilayah Malang Raya. Daerah itu antara lain Kecamatan Poncokusumo, Tumpang, Wajak, Pakiasji, Wagir, Singosari, dan Pakis untuk kabupaten Malang. Sedangkan dari Kota Malang antara lain Pandanwangi Kecamatan Blimbing.

Terdapat dua faktor utama yang yang mendorong pekerjaan sebagai PRT yaitu karena *kemiskinan* dan *kebutuhan tenaga kerja domestik*. Surabaya sebagai ibu kota propinsi Jawa Timur secara ekonomis menarik banyak pendatang dari daerah-daerah disekitarnya yang bertujuan untuk mencari nafkah. Malang Raya yang berkembang menjadi kota pariwisata dan kota pendidikan menjadi tujuan PRT.

Dalam kondisi perekonomian yang sulit, lapangan pekerjaan yang sempit, maka bagi sebagian orang yang merasa tidak memiliki pendidikan dan keahlian memadai terpaksa menjadi pekerja rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Kurangnya pendidikan dan keahlian yang dimiliki pekerja rumah tangga akan berakibat pada rendahnya daya tawar yang dimiliki sehingga tidak banyak pilihan bagi pekerja rumah tangga. Faktor pendorong utama bagi informan bekerja sebagai PRT adalah kemiskinan, mencari pengalaman (bagi PRT usia muda) dan permasalahan rumahtangga PRT misalnya memiliki hutang, penghasilan suami atau orang tua tidak cukup. Sulitnya mencari pekerjaan lain dan keterbatasan ketrampilan PRT mengakibatkan mereka tidak memiliki banyak pilihan.

Adapun faktor peluang kerja di kota menjadi penarik bagi PRT. Kebutuhan rumahtangga lapisan menengah ke atas dimana isteri berkarier, tidak dapat dipisahkan dari PRT. Mereka memerlukan PRT sebagai pengganti tugas tradisional di rumah. Ibu rumahtangga dari lapisan atas memerlukan tenaga PRT karena beban kerja rumahtangga

dirasa cukup berat. PRT sebagai tenaga pembantu ataupun pengganti ibu rumahtangga dan perempuan karier.

Latar Belakang mereka akibat tekanan dari keluarga (maupun suami), biasanya berupa desakan agar mereka mencari penghasilan tambahan untuk keluarga. Hal ini berdampak bahwa pekerjaan sebagai PRT merupakan sumber penting mata pencaharian bagi perempuan pedesaan. Untuk mendapatkan PRT bagi majikan ada dua cara, yang pertama sebagian besar terjadi melalui teman, tetangga dan keluarga. Hal ini biasanya lebih banyak disukai karena menawarkan kemungkinan lebih besar untuk menemukan PRT yang baik serta menghindari masalah. Cara kedua, melalui melalui para perantara informal (seperti calo) ataupun formal (seperti informal seperti agen penyalur). Melalui perantara bagi majikan tidak diminati oleh majikan, karena perantara tidak sungkan meminta balas jasa dari majikan sekitar Rp 500.000-Rp 700.000. Kadangkala PRT masih dua minggu sudah keluar dan diganti lagi, atau baru dua bulan lebih sudah keluar. Mengingat kalau sudah dua bulan, perantara tidak akan mengembalikan uang jasa tersebut.

PRT di Surabaya dan Malang Raya tidak ada standart yang jelas terkait jam kerja harian, waktu istirahat, waktu cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan); upah minimum, hak PRT untuk berasosiasi, hak untuk mengorganisasikan diri mereka sendiri, dan hak untuk bebas mengekspresikan opini mereka untuk meningkatkan kondisi kerja mereka. Selain itu, tidak ada persyaratan tentang umur minimum untuk bekerja sebagai PRT. Dampak dari tidak adanya standardisasi, masalah yang muncul adalah PRTA dan bisa juga minimnya upah yang diperoleh maka para pekerja rumah tangga tidak bisa mengambil alternatif lain selain menjadi pekerja rumah tangga.

Di Kolombia dan Spanyol, para PRT dicakup oleh upah minimum yang ditetapkan untuk semua pekerja (Jose, 2003:53). Pendekatan ini layak dipuji, namun tidak mungkin secara politis atau secara administratif bagi Indonesia untuk melakukan transisi secara langsung dari PRT yang awalnya tidak terjangkau upah minimum menjadi terjangkau dalam tingkat upah minimum umum. Sebuah pendekatan alternatif adalah dengan menciptakan upah minimum "sektoral" yang berlaku bagi para PRT. Sistem demikian telah dimanfaatkan di beberapa yurisdiksi lain, termasuk Perancis, Ontario (Kanada), Malta, Tanzania, Filipina dan Afrika Selatan (Jose, 2003:52).

Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ILO tentang Penetapan Upah Minimum, Tahun 1970 (Konvensi ILO No. 131) memiliki tanggung jawab tambahan dalam melindungi upah para PRT. Sebagai contoh, Uruguay telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah tahun 1990 yang secara eksplisit menjamin bahwa para PRT memiliki akses

terhadap sebuah sistem untuk menetapkan upah minimum (Jose, 2003). Surat keputusan tersebut dibuat sebagai respons terhadap keputusan Komite Ahli ILO untuk Penerapan Konvensi dan Rekomendasi, yang mendemonstrasikan bahwa Uruguay mematuhi konvensi ILO tentang Penetapan Upah Minimum.

Secara umum, keberadaan PRT di Surabaya dan Malang Raya kurang mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun pemenuhan kebutuhan secara layak. Padahal, sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran produktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk permasalahan dan perlakuan yang tidak disadari oleh PRT itu sendiri.

Sampai saat ini perlindungan hukum dan pengakuan hak terhadap PRT masih sangat lemah. Kondisi kerja PRT sepenuhnya tergantung kepada pengguna jasa (majikan). Apabila pengguna jasa memperlakukannya dengan baik, maka PRT memiliki dan menerima kondisi kerja yang wajar. Demikian pula sebaliknya. Banyaknya kasus yang menimpa PRT tersebut salah satunya bersumber dari lemahnya perlindungan terhadap mereka.

Secara hukum mereka tidak termasuk dalam kategori pekerja sektor formal, sehingga tidak terlindungi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini juga belum memadai sebagai acuan untuk mengatur PRT, karena tidak menyebut PRT secara eksplisit sebagai tenaga kerja. Walaupun sudah ada Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah pada tanggal 16 Juni 2011, namun di Indonesia belum dapat dijadikan dasar hukum karena belum diratifikasi ke dalam hukum positif Negara kita.

Pada tanggal 16 Juni 2011, Konvensi ILO No. 189 atau Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 mengenai kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga diadopsi oleh Konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 183 Negara Anggota ILO. Konvensi No. 189 memberikan perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga dengan menetapkan hak- hak dan prinsip-prinsip dasar, serta mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah-langkah yang bertujuan merealisasikan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Konvensi No. 189 mendefinisikan pekerjaan rumah tangga sebagai "pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga", bisa mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota sebuah keluarga, anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebun, menjaga rumah, menyetir untuk keluarga tersebut, bahkan merawat binatang peliharaan rumah tangga.

Salah satu solusi terkait dengan permasalahan PRT, perlunya membangun kerja layak

bagi PRT di Surabaya dan Malang Raya (kota Malang, kabupaten Malang dan kota Batu), mengingat beberapa undang-undang nasional memberikan perlindungan untuk bidang tertentu, meskipun tidak secara spesifik meliputi: (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pengha-pusan kekerasan di rumah tangga. (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; (3) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di Surabaya dan Malang Raya, sudah mulai merancang perlindungan para PRT dan bentuk organisasinya. Dengan adanya organisasi untuk menciptakan kerja layak bagi PRT berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan hak-hak PRT sebagai manusia, perempuan dan buruh.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan berbagai persoalan tersebut diatas, maka sangat diharapkan semua kebijakan negara maupun peraturan daerah bisa diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan untuk membangun kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal. Adapun rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal dan strategi apa yang perlu dikembangkan dalam memperoleh hak-hak dasar PRT seperti usia minimum bekerja, kondisi tempat kerja, batas waktu kerja, perlindungan dari kekerasan, waktu istirahat, waktu cuti, menu makanan, akses ke perawatan kesehatan, upah minimum, tidak memiliki organisasi dan kebijakan yang melindungi PRT ; yang perlu dibangun dan dikembangkan oleh berbagai fihak untuk merubah kondisi ini?
2. Bagaimana hambatan dan potensi (pendukung) yang meliputi : sosial budaya/kekuatan-kelemahan nilai-nilai budaya lokal, kebijakan, SDM, sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung membangun kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal?

Rumusan masalah tersebut diatas merupakan untuk tahun kedua, dimana penelitian ini lebih kearah kelembagaan (kebijakan).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Fenomena PRT di Indonesia kini tidak mungkin dilepaskan dari kemiskinan struktural dan pendidikan yang rendah hingga memaksa PRT perempuan bekerja dengan relasi kekuasaan yang timpang dan posisi tawar yang sangat lemah. Sehingga dalam hal ini seringkali PRT menjadi objek diskriminasi dengan segala bentuk pelecehan yang dideritanya, khususnya PRT perempuan dengan segala kelemahan yang dimilikinya.

Konsep Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Nurhadi, 2007: 13). Lebih lanjut Nurhadi (2007: 13) menyebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*povertyline)* atau batas kemiskinan (*povertytresshold)*. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan secara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Sajogyo (1988), mengartikan kemiskinan tidak sebatas hanya dicerminkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan pengeluaran. Sajogyo memandang kemiskinan secara lebih kompleks dan mendalam dengan ukuran delapan jalur pemerataan yaitu rendahnya peluang berusaha dan bekerja, tingkat pemenuhan pangan, sandang dan perumahan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kesenjangan desa dan kota, peran serta masyarakat, pemerataan, kesamaan dan kepastian hukum dan pola keterkaitan dari beberapa jalur tersebut.

Menurut Bappenas (2002), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Bank Dunia (1990) mendefinisikan kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US$ 1 per hari.

Selanjutnya Bank Dunia menyebutkan dimensi kemiskinan adalah politik, sosial dan budaya, dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap aset. Dimensi tersebut saling terkait dan

saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Biro Pusat Statistik (2002, dalam Syaefudin, 2003) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Menurut BKKBN (dalam Saefudin, 2003) kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian ini didefinisikan lebih lanjut menjadi keluarga miskin, yakni: (1) Paling tidak sekali seminggu keluarga makan daging ikan/telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian baru, (3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk tiap penghuni. Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indicator yang meliputi: (1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, (2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pada umumnya kemiskinan didefinisikan sebagai pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh masukan kalori dasar. Salah satu pendekatan yang paling baik dan mengimplementasikan matriks keseluruhan dari kemiskinan adalah konsep kebutuhan dasar dari Philipina (ADB, 1999, dalam Syaefudin, 2003), yang mendefinsikan dalam 3 tingkat hierarki kebutuhan yaitu: (1) *Survival*: makan/gizi, kesehatan, air bersih/sanitasi, pakaian (2) *Security*: rumah, damai, pendapatan, pekerjaan dan (3) *Enabling*: pendidikan dasar, perawatan keluarga, psikososial.

Menurut Suparlan (1984), kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Secara konseptual, Sinaga dan White (1980, dalam Sinaga dan White , 1988) membagi kemiskinan ke dalam dua aspek (yang menunjuk pada sumber penyebab): kemiskinan alamiah dan buatan (struktural), Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan tingkat teknologi yang dimiliki masyarakat penderita kemiskinan masih sangat langka. Sedangkan kemiskinan struktural lebih diakibatkan oleh perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu sendiri; kemiskinan itu terjadi

karena kelembagaan-kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana-sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Soemardjan (1980, dalam Sayogyo, 1988), menyebutkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka.

Friedman (1979) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah ketidak samaan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial meliputi: (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau aset misalnya tanah, perumahan, peralatan dan lain-lain; tetapi juga mencakup *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; sumber keuangan (pendapatan dan kredit) yang memadai; organisasi sosial politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, usaha kelompok); ketrampilan dan pengetahuan yang memadai dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan manusia.

Dalam penelitian ini, konsep kemiskinan lebih mengarahkan pada definisi kualitatif seperti keterlibatan seseorang (dengan melihat gender) pada akses informasi, kontrol, pengambilan keputusan, keorganisasian untuk mencapai kepentingan bersama. Intinya konsep kemiskinan lebih mengarah pendapatnya Friedman.

Kemiskinan selalu dilihat dari satu sudut pandang kemiskinan karena alasan ekonomi. Ari Ujianto (dikutip Amirudin dan Lita Purnama dlm JP.42.2005) menyebutkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia adalah kemiskinan majemuk dalam arti kemiskinan yang terjadi bukan hanya kemiskinan sandang pangan, tetapi juga kemiskinan identitas, informasi, akses, partisipasi dan kontrol. Oleh karena itu menurutnya, sebagian besar PRT perempuan ini adalah miskin karena tidak hanya secara ekonomi mereka terkebelakang tetapi juga dalam hal keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, politik, kesehatan dan lain-lain, partisipasi merekapun kurang diberi tempat. Hal ini yang pada gilirannya memunculkan kemiskinan di kalangan para PRT perempuan pada umumnya.

Konsep Kebijakan

Disisi lain, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman* (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Makna ratifikasi suatu Konvensi Internasional dengan undang-undang adalah suatu perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan substansif Konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.

Selanjutnya, telah diungkapkan secara gamblang peraturan perundang-undangan yang memuat kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hak perempuan. Selain itu diperlihatkan juga peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan dampak merugikan hak, kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ada peraturan perudang-undangan dan kebijakan yang menjamin hak perempuan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kewajiban itu tidak terpenuhi, seperti terlihat dari angka-angka yang disajikan mengenai pendidikan dan perwakilan politik di bidang politik dan publik.

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan tersebut di atas, penelitian ini akan menggunakan *theory of justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles mengenai pengertian dari keadilan. Menurut teori ini, *theory of justice* terdiri dari *distributive justice* dan *corrective justice* (M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction To Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001, hal. 523).

Pada dasarnya *distributive justice* adalah adanya pembagian yang merata pada setiap masing-masing orang. Dalam *Nichomachean Ethics*, Aritoteles mengungkapkan bahwa pendistribusian tersebut dikaitkan dengan hak yang dimiliki yang disesuaikan dengan klaimnya masing-masing berdasarkan atas kebutuhan atau moral yang baik. Selanjutnya dikatakan oleh Aristoteles bahwa *distributive justice* ini adalah kebajikan terbesar yang dimiliki manusia. Dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah bahwa *distributive justice* pemberlakuannya dapat diterapkan secara global, tidak hanya bersifat domestik saja (satu negara) (Hilde Bojer, 2003, hal. 6-8).

Sedangkan yang dimaksud dengan *corrective justice* adalah adanya suatu kewajiban atas suatu kompensasi yang standarnya ditetapkan berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini, ditekankan adanya hubungan antara yang seharusnya dimiliki dalam rangka untuk memperbaiki atas suatu hak yang telah hilang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain (M.D.A Freeman, 2001, hal. 164).

Kemudian dikatakan bahwa standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang. Dalam hal ini ditekankan adanya perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selanjutnya, diungkapkan bahwa Aritoteles melihatnya sebagai alat untuk meluruskan arah hukum yang telah salah sebagai akibat sifatnya yang umum. Hukum tampil dengan bahasa yang umum, padahal tidak seluruh hal yang bersifat konkret yang dapat dimasukkan ke dalam pengaturan yang bersifat umum itu tanpa risiko menimbulkan ketidakadilan (Achmad Ali, 1996, hal. 270).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sehingga dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum bagi PRT perempuan di Indonesia dapat menjamin hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh bagi para pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia. Kepastian hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia mampu membawa misi *theory of justice* bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini seperti bagian yang termarginalkan di masyarakat.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini lebih menekakan permasalahan bentuk-bentuk permasalahan PRT seperti usia minimum bekerja, kondisi tempat kerja, batas waktu kerja, perlindungan dari kekerasan, waktu istirahat, waktu cuti, menu makanan, akses ke perawatan kesehatan, upah minimum, tidak memiliki organisasi dan kebijakan yang melindungi PRT. Hal ini dilakukan agar terwujudnya membangun kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi alternatif program yang dapat dikembangkan yang terkait dengan kebijakan negara.

Secara khusus studi ini bertujuan untuk:

1. Mencari formulasi membangun kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal dan strategi yang perlu dikembangkan dalam memperoleh hak-hak dasar PRT seperti usia minimum bekerja, kondisi tempat kerja, batas waktu kerja, perlindungan dari kekerasan, waktu istirahat, waktu cuti, menu makanan, akses ke perawatan kesehatan, upah minimum, tidak memiliki organisasi dan kebijakan yang

melindungi PRT; yang perlu dibangun dan dikembangkan oleh berbagai fihak untuk merubah kondisi ini i.

2. Mengidentifikasi hambatan dan potensi (pendukung) yang meliputi : sosial budaya/kekuatan-kelemahan nilai-nilai budaya lokal, kebijakan, SDM, sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung membangun kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal.

3.2 Manfaat Penelitian

Pekerjaan domestik yang dilakukan oleh PRT seringkali diabaikan hingga akhirnya disepelekan menjadi status yang termarjinalkan. Status tersebut dilakukan di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai pekerjaan informal, sehingga belum ada kebijakan terkait dengan kerja layak. Oleh karena penelitian ini sangat penting diantaranya :

Pertama, sebagian besarnya adalah perempuan, dengan usia belum dewasa rata-rata dibawah 18 tahun, berasal dari daerah pedesaan miskin, pendidikan rendah rata-rata lulusan SD dan SMP dan kesempatan kerja terbatas.

Kedua, perempuan sebagai PRT akibat dari tekanan dari keluarga, biasanya berupa desakan agar mereka mencari penghasilan tambahan untuk keluarga atau bahkan sebagai upaya untuk melarikan diri dari tekanan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur PRT terkait dengan kerja layak kondisi tempat kerja, tempat tidur PRT, batas waktu kerja, makanan yang layak dan bergizi, tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang baik dan murah, dan tidak diberikan tempat yang layak untuk beristirahat, upah minimum bahkan pelecehan atau eksploitasi di tempat kerja.

Keempat, rekrutmen PRT sebagian besar terjadi melalui teman dan keluarga. atau melalui agen penyalur. Hal inilah terjadi kerentanan pekerjaan sebagai PRT sudah dimulai seperti perjanjian kerja atau yang dinamakan kontrak kerja yang tidak dijelaskan melalui perekrutan ini.

Betapa pentingnya penelitian ini, maka pada tanggal 16 Juni 2011, Konvensi ILO No. 189 atau Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 mengenai kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga diadopsi oleh Konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 183 Negara Anggota ILO.

Konvensi No. 189 ini memberikan perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga dengan menetapkan hak- hak dan prinsip-prinsip dasar, serta mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah-langkah yang bertujuan merealisasikan kerja layak bagi pekerja rumah tangga.

Konvensi No. 189 mendefinisikan pekerjaan rumah tangga sebagai "pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga", bisa mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota sebuah keluarga, anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebun, menjaga rumah, menyetir untuk keluarga tersebut, bahkan merawat binatang peliharaan rumah tangga.

Standar minimal yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 untuk pekerja rumah tangga, meliputi:

1. Hak-hak dasar pekerja rumah tangga
2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja
3. Jam Kerja
4. Pengupahan
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Jaminan
7. Standar mengenai pekerja rumah tangga anak
8. Standar mengenai pekerja tinggal di dalam
9. Standar mengenai pekerja rumah tangga migrant
10. Agen ketenagakerjaan swasta
11. Penyelesaian perselisihan, pengaduan dan penegakan peraturan

Kerja Layak untuk PRT bertujuan mengurangi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) secara efektif dengan membangun kapasitas kelembagaan mitra untuk mempromosikan kerja layak bagi PRT dan penghapusan PRT anak. Penelitian ini diharapkan menjadi model bagi pemerintah, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja serta Lembaga Swadaya Masyarakat seperti JALA-PRT, melalui berbagai kegiatan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas pemberdayaan PRT/PRTA serta mendorong perlindungan PRT.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB 4

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala-gejala yang menjadi pusat perhatian peneltitian dan hakekat hubungan antara gejala-gejala tersebut dengan aspek-aspek kehidupan warga masyarakat yeng diteliti (Suparlan, 1994). Penjelasan mengenai prinsp-prinsip yang mendasari gejala yang diteliti dan hubungan antara gejala-gejala tersebut dengan berbagai aspek kehidupan lainnya dengan demikian akan menggunakan sudut pandang warga masyarakat yang diteliti, dalam arti akan menggunakan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan makna yang diberikan masyarakat terhadap gejala-gejala tersebut.

Dalam penelitian kualitatif sasaran kajian atau masalah penelitian merupakan suatu satuan yang bulat atau menyeluruh yang dikaji dengan cara memahami dan bukan dengan cara mengukur. Sasaran kajian yang dipandang sebagai satuan yang bulat dan menyeluruh (*whole a system)* tersebut merupakan corak pandang yang dinamakan juga sebagai penelitian yang bersifat holistik.

4.1 Penentuan Lokasi Penelitian :

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan secara purposif, mengambil lokasi di wilayah Surabaya dan Malang Raya. Pertimbangan yang diambil *pertama*, warga Surabaya dan Malang Raya (kota Malang, kabupaten Malang dan kota Batu) sangat ketergantungan dengan PRT. *Kedua*, banyak penduduk lain dari Surabaya dan Malang Raya, yang mengais rejeki ke Surabaya sebagai PRT. *Ketiga*, kedua lokasi ini sangat berkembang pesat perumahan-perumahan baru. *Keempat*, Di kedua lokasi tersebut, sudah mulai merancang perlindungan PRT dan bentuk organisasinya. Dengan adanya organisasi tersebut untuk menciptakan kerja layak bagi PRT, berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan hak-hak PRT sebagai manusia, perempuan dan buruh.

4.2 Pengumpulan Data

Pengamatan atau *Observation*

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan para PRTD maupun PRTA yang hidup dalam lingkungan perumahan. Pengamatan ini meliputi : hubungan social ketetanggaan antar warga, hubungan sosial antar PRTD/PRTA, hubungan social majikan dengan PRTD/PRTA, kondisi PRTD/PRTA dan keberadaan agen penyalur PRT. Pengamatan ini dilakukan untuk mencermati berbagai aktifitas dan kehidupan masyarakat setempat.

Selain pengamatan, juga dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dari wawancara yang berisi pedoman wawancara, bersifat pertanyaan terbuka (*open ended question*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, monografi kecamatan, kelurahan, artikel yang berhubungan dengan topik penelitian, Surabaya dan Malang raya dalam angka dan Badan Pertanahan Nasional kota Surabaya dan Malang Raya.

Wawancara Mendalam atau *indepth interview*

Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan

Untuk menunjang wawancara mendalam, peneliti menggunakan peralatan lain yaitu buku catatan harian, yang terbagi menjadi dua. Pertama, buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan kedua, buku catatan harian mengenai hasil wawancara. Pencatatan dilakukan secara langsung dan berdasarkan dari ingatan.

Selain pengamatan dan wawancara mendalam, dalam pengumpulan data juga dilakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang sudah tersedia di kelurahan sampai kecamatan. Dalam melengkapi data-data informasi yang diperlukan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menggunakan studi kepustakaan.

4.3 Informan

Dalam penelitian ini yang termasuk informan adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang permasalahan yang diteliti. Penentuan informan dipilih secara *purposive* dengan kriteria : PRTA *live in* dan *live out*, majikan PRTD, majikan PRTA, PRTD *live in* dan *live out*, pihak orang tua keluarga PRTA, agen penyalur, seseorang yang benar-benar mengetahui kehidupan PRT (RT, RW, kelurahan bahkan sampai kecamatan), para aktivis yang konsern masalah PRT seperti JALA-PRT, ILO Surabaya, dan instansi pemerintah meliputi UPTP3TKI, Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKBPM, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, yang terkait dengan program-program perlindungan PRT.

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, akan didata dulu kompleks perumahan yang berada di Surabaya dan Malang Raya. Dari kedua wilayah ini, akan ditentukan kecamatan maupun kelurahan yang memiliki PRT. Untuk mendapatkan informasi ini, dihimpun melalui RT setempat, pihak security maupun bertanya pada warga setempat terkait dengan warganya yang memiliki PRT.

Penentuan informan dipilih secara *purposive* dengan kriteria : PRTA, majikan PRTD, majikan PRTA, PRTD dan satu agen penyalur. Dari kriteria tersebut, maka terdapat dua puluh dua informan yang berhasil diwawancari yang terdiri dari :

1. Dua informan PRTA yang berada di kecamatan Wiyung dan Tambaksari. Satu informan bernama Aisyah di Wiyung dan Yesy di Tambaksari. Dua PRTA berada di Malang Raya. Keempat informan ini untuk menggali data yang sifatnya *life history* yang berkaitan dengan dari awal pengambilan keputusan menjadi PRTA di Surabaya maupun di kabupaten/kota Malang dan mencari alasan yang mendasar dari pengambilan keputusan tersebut.
2. Tiga informan majikan PRTD yang berada di kecamatan Wiyung dan Tambaksari. Satu informan bernama ibu Febri di Wiyung, sedangkan di Tambaksari ibu Myta dan ibu Frida. Untuk ibu Febri dan ibu Myta untuk mengetahui perlakuan dan sikap terhadap PRTDnya, hak-hak dasar PRTD serta hubungan social dengan PRTDnya. Selain itu juga, untuk mengetahui pandangan majikan PRTD terhadap kebijakan perlindungan terhadap PRT, terutama ibu Myta yang berpendidikan S1 Sarjana Hukum dan bekerja di lingkungan Fakultas Hukum. Untuk informan ibu Frida yang ingin diteliti adalah dari segi etnisitas. Kebetulan ibu Frida adalah etnis Tionghoa yang berada di kecamatan Tambaksari. Mengingat kecamatan Tambaksari, etnis

Tionghoa cukup banyak. Keberadaan ibu Frida sebagai etnis Tionghoa untuk mengetahui perlakuan dan sikap terhadap PRTDnya, hubungan social dengan PRTDnya yang etnisitasnya Jawa.

3. Dua informan majikan PRTA yang berada di kecamatan Wiyung dan Tambaksari. Satu informan bernama bapak Suharijono di Gubeng, sedangkan di Tambaksari ibu Luluk. Kedua informan ini untuk mengetahui perlakuan dan sikap terhadap PRTAnya, hak-hak dasar PRTA serta hubungan social dengan PRTAnya. Selain itu juga, untuk mengetahui pandangan majikan PRTA terhadap kebijakan perlindungan terhadap PRTA dan hak belajar .
4. Tiga informan PRTD yang berada di kecamatan Wiyung dan Tambaksari. Dua informan bernama Trini dan Dewi di Wiyung dan Katmini di Tambaksari. Delapan informan PRTD di Malang Raya. Sebelas informan ini untuk menggali data yang sifatnya *life history* yang berkaitan dengan dari awal pengambilan keputusan menjadi PRT di Surabaya dan mencari alasan yang mendasar dari pengambilan keputusan tersebut. Namun ketiga informan ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk informan Trini, peneliti hanya ingin mengetahui hubungan social antara PRT di lingkungan perumahan. Informan Dewi, untuk mengetahui bagaiman informan bisa membagi waktu antara kuliah dengan berbagai jenis pekerjaannya termasuk mengasuh anak majikan. Sedangkan informan Katmini, untuk mengetahui jaminan kesehatan yang sudah dialami untuk diri sendiri melalui asuransi kesehatan.
5. Dua orang dari pihak orang tua keluarga PRTA dilakukan dengan wawancara untuk PRTA bernama Yesy, yang kebetulan bekerja sebagai PRT dilingkungan keluarga majikan. Selanjtnya juga orang tua keluarga PRTA bernama Arif. Wawancara yang dilakukan dengan orang tua Arif, hanya dapat dilaksanakan pada hari minggu. Karena orang tua Arif, setiap hari dari pagi sampai petang menjadi Office Boy di lingkungan Unair dan ibunya menjadi PRT.
6. Satu agen penyalur selain keterkaitan dengan memberikan dan/atau menerima informasi mengenai lowongan pekerjaan PRT dan suplai tenaga kerja PRT dari atau kepada pengguna jasa dan PRT. Wawancara ini dilakukan untuk menggali komitmen antara pengguna jasa dan PRT. Bentuk-bentuk pelatihan yang sudah dilakukan dan program-program yang mereka miliki terkait dengan kesehatan PRT.

7. Satu orang Pemantauan berbasis komunitas (PBK) untuk membangun relasi antara pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa. yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur yang berpusat di kota Malang. Model PBK dimaksudkan untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap keberadaan PRT yang ada di lingkungannya termasuk hubungannya dengan majikannya.

4.4 Analisa Data

Teknik analisa dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Kajian normatif berupa analisis kebijakan formulasi Konvensi ILO No. 189 atau Konvensi PRT 2011 mengenai kerja layak bagi PRT, UU nomor 23 tahun 2004 tentang pengha-pusan kekerasan di rumah tangga, UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebijakan ini kemudian dikaitkan dengan pengumpulan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah saling keterkaitan dan kesesuaian dari keempat asas kebijakan tersebut dengan hasil pengumpulan data di lapangan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasikan berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab).

Selanjutnya, setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, peneliti membuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan antropologi. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Kegiatan ini terus berlangsung dan berakhir setelah peneliti pandang cukup untuk menyusun laporan akhir.

Desain riset dan tahapan penelitian serta indikator capaian tahunan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

4.5 Indikator Capaian Tahunan

Desain riset dan tahapan penelitian serta indikator capaian tahunan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

KEGIATAN TAHAP II PENELITIAN

No	Tahapan	Luaran	Indikator
1.	Mencari formulasi model kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal dan strategi yang perlu dikembangkan dalam memperoleh hak-hak dasar PRT seperti usia minimum bekerja, kondisi tempat kerja, batas waktu kerja, perlindungan dari kekerasan, waktu istirahat, waktu cuti, menu makanan, akses ke perawatan kesehatan, upah minimum, organisasi dan kebijakan yang melindungi PRT.	Memperoleh data dalam menentukan formulasi model kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal dan strategi yang perlu dikembangkan dalam memperoleh hak-hak dasar PRT.	Menemukan formulasi model formulasi model kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal dan strategi yang perlu dikembangkan dalam memperoleh hak-hak dasar PRT. di JALA PRT, ILO dan UPTP3TKI Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKBPM, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan.
2.	Mencari data dan informasi tentang hambatan dan potensi yang meliputi : sosial budaya/kekuatan-kelemahan nilai-nilai budaya lokal, kebijakan, SDM, sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung membangun kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal	Mengidentifikasi hambatan dan potensi yang meliputi : sosial budaya/kekuatan-kelemahan nilai-nilai budaya lokal, kebijakan, SDM, sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung membangun kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal	Menemukan hambatan dan potensi yang ada kerja layak PRT sebagai upaya perlindungan pada kelompok marginal dengan melakukan FGD bersama JALA PRT, ILO dan UPTP3TKI Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKBPM, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Keberadaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Organisasi sosial kemasyarakatan di dalam kehidupan manusia ini, merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan 1) adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, 2) adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, 3) adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, 4) berstruktur,berkaidah dan mempunyai pola perilaku, 5) bersistem dan berproses. Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka adalah nasib yang sama, kepentingan yang sama, ideologi yang sama dan politik yang sama.Salah satu organisasi social kemasyarakatan yang paling umum berada di tiga wilayah lokasi penelitian adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau yang disingkat dengan PKK menjadi ujung tombak dalam membantu pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Misal PKK di kecamatan Tambaksari memiliki program mengurangi AKI (Angka Kematian Ibu). Menurut ketua kecamatan Tambaksari PKK ibu Nani, 46 tahun, total AKI di Surabaya tahun 2014 sudah mencapai 49 jiwa. Salah satu upaya untuk menekan angka itu adalah melakukan program pendampingan ibu hamil risiko tinggi (risti). Warga yang tergabung dengan PKK adalah para ibu-ibu yang tidak bekerja (ibu RT), memiliki kesadaran pengetahuan kesehatan yang tinggi. Untuk ibu-ibu yang bekerja dari pagi dan sore atau bahkan sampai malam jarang ikut bergabung di kegiatan social ini. Kegiatan pelaksanaan PKK di hampir tiap RT, RW, kelurahan bahkan kecamatan berbeda-beda, ada yang sore hari jam 16-18 tetapi hari minggu dan ada yang jam 19-21.

Berbeda PKK di kecamatan Wiyung kelurahan Wiyung terutama di perumahan elit seperti Taman Pondok Indah, Pratama, Pondok Rosan, Wiyung Regency hampir tidak ada kegiatan PKK. Pada umumnya mereka sibuk bekerja dan masyarakatnya tertutup. Untuk pengaturan waktu, yang masih dibutuhkan mencari waktu yang tepat sesuai dengan kesempatan/waktu luang warga. Untuk perumahan yang berada di kelurahan Babatan seperti perumahan Babatan Pilang, Babatan Mukti, Babatan Indah, Sampurna dan Ampel masih ada kegiatan PKK. Untuk mengumpulkan warga saat dilakukan kegiatan PKK, awalnya agak sulit. Berkat bantuan dari semua aparat RW dan RT di kelurahan Babatan, dengan model pendekatan persuasif dengan mengikuti kebiasaan kebiasaan warga, maka kegiatan PKK yang

dilaksanakan pada hari minggu jam 15-17. Namun dalam prakteknya dalam hal ketepatan waktu, baru dapat dilaksanakan pukul 16.00 WIB, sehigga praktis hanya terdapat 1,5 jam waktu yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan di lingkungn RT atau RW setempat.

Program kegiatan PKK di kelurahan Ploso meliputi :

1. Resiko tinggi penurunan status kesehatan lansia : screening kesehatan lansia, terbentuknya kepompok kerja lansia, pemeriksaan dan pengobatan lansia berkala, posyandu lansia, pelayanan kesehatan, senam lansia, penyuluhan dan bimbingan spiritual, aktifitas ringan dan sosialisasi, pembinaan kesehatan lansia
2. Resiko terjangkit penyakit demam berdarah : kerja bakti massal (Gerakan Minggu bersih), lomba kebersihan lingkungan, survey/pemantauan jentik berkala, penyuluhan tentang penyebab, siklus hidup nyamuk dan upaya pemutusan siklus hidup nyamuk, pembentukan Pokjakes
3. Resiko terjadinya kenakalan remaja : penyuluhan bahaya narkoba, AIDS dan Sex Education, pendayagunaan/pengaktifan karang taruna, kampanye anti Narkoba
4. Mengefektifkan pemanfaatan posyandu : kderisasi kader posyandu dan penyegaran kader posyandu, penyuluhan manfaat Posyandu dan imunisasi.

Kegiatan PKK di kecamatan Gubeng, lebih bergerak pada gerakan lingkungan seperti Kampung Green and Clean, Bank Sampah, dan Pengolahan Sampah Sisten Komposter dan Takakura. Mengingat wilayah Gubeng merupakan perkampungan ada sekitar 160 Gakin (keluarga miskin), PKK di kecamatan Gubeng mempunyai program peduli gakin, membantu mensukseskan program pemerintah kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan raskin (beras miskin). Seperti PKK di RW XIII Kertajaya seperti RT 04, RT 06, RT 10 dan RT 11, ikut berpartisipasi program Pemerintah Kota Surabaya dalam lomba SCGC 2012 atau lebih dikenal dengan Surabaya Cantik Green and Clean Tahun 2012.

PKK di kecamatan Gubeng mendapatkan Sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terbaik. Keberadaan water treatment/instalasi pengolahan air limbah rumah tangga di wilayah RW XIII Kertajaya, merupakan bantuan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB), dengan dibangunnya IPAL di wilayah RW XIII banyak manfaat dan fungsinya antara lain ::

1. memanfaatkan air limbah rumah tangga untuk diproses menjadi air bersih.
2. membuat lngkungan akan menjadi bersih dan sehat
3. menekan sumber penyakit yang disebabkan dari air limbah/selokan yang kotor
4. aliran air selokan akan menjadi lancar/mengalir, shg menekan timbulnya jentik nyamuk
5. walaupun musim kemarau air untuk menyirami tanaman warga tetap tersedia.

Pada umumnya semua kegiatan PKK yang terlibat adalah masyarakat pribumi. Etnis Cina jarang sekali ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan PKK, ketika waktu ada pertemuan PKK di kelurahan Ploso. Pada saat tim Unair menjelaskan penelitian PRT ini kepada ibu-ibu di kegiatan PKK semua peserta hadir. Pelaksanaan ini tepat didepan rumah etnis Cina. Tuan rumah dari etnis Cina inipun tidak hadir.

Untuk organisasi keagamaan di tiga wilayah penelitian, hampir tidak ditemukan. Namun yang ada adalah masjid berbasis NU maupun Muhammadiyah. Masing-masing warga akan melaksanakan ritual keagamaannya di masjidnya masing-masing berdasarkan kenyakinan NU ataukah Muhammadiyah. Mereka sangat fanatik terhadap kenyakinan masing, seperti pernyataan bapak Suharijono umur 65 tahun warga Gubeng "*disini itu bu, kalau sholat Jumat ya di masjidnya sendiri-sendiri. Kalau NU ke NU, Muhammadiyah ke masjid Muhammadiyah*". Dari pernyataan tersebut diatas jelaslah ada fanatik kenyakinan dari golongan NU maupun Muhammadiyah.

Kasus yang menarik di Tambaksari, hilangnya satu keluarga Jusman Ary Sandy di Turki 15 Maret 2015 adalah bersama istri, Ulin Isnuri, serta empat anaknya, Urayna Afra 17 tahun, Dayyan Akhtar 7 tahun; Aura Kordova 9 tahun dan Humaira Hafshah. Jusman tinggal di Jalan Kedung Sroko VII/28 A, Kecamatan Tambaksari. Berdasarkan informasi dari tetangga Jusman bernama Suliati umur 67 tahun , "*Jusman itu orangnya baik dan ramah. Ia juga dikenal sebagai muslim yang taat lho.Tidak mau salat di masjid NU. Mereka sering menunaikan salat di Langgar Al Kaustar yang berbasis Muhammadiyah.*

Orang tua Ulin saat ditemui di Jalan Kanser 35, Ploso, Kecamatan Tambaksari, bernama Sumiati, menolak diwawancarai. Intinya Ulin bisa pergi ke Turki dan tidak kembali, bahwa pihak keluarga pernah mendengar niat Ulin untuk pergi jauh. Keluarga tidak setuju. Meski tak ada izin khusus. Ulin bersama suami dan anak-anaknya ternyata tetap pergi tanpa pamit pada keluarga.

5.2 Model Pemantauan Berbasis Komunitas (PBK) Dalam Relasi PRT Dengan Majikan

Pemantauan Berbasis Komunitas (selanjutnya disingkat PBK) merupakan sebuah model yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur yang berpusat di kota Malang. Model PBK dimaksudkan untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap keberadaan PRT yang ada di lingkungannya termasuk hubungannya dengan majikannya. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan penguatan atau pendekatan kerja layak kepada majikan termasuk perlakuannya terhadap PRT. Pembentukan Model PBK sebenarnya hanyalah merupakan salah satu dari

beberapa pendekatan dan strategi yang dilakukan LPKP, yang ruang lingkup dari program kegiatannya adalah melakukan promosi kerja layak bagi PRT dan penghapusan PRTA. Selain itu juga mempromosikan bahwa PRT adalah juga pekerja yang harus diakui dan dipenuhi akan hak-haknya sebagai pekerja oleh pengguna jasa kepada masyarakat dan stakeholder yang lainnya. Adapun Pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh LPKP adalah: (1) Penjangkauan dan pengorganisasian PRT; (2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan PRT melalui pelatihan atau sekolah PRT dan memberikan sesi edukasi; (3) Mempromosikan kerja layak bagi PRT lewat media sosial, tokoh agama dan pemerintah; (4) Melakukan pemantauan PRT berbasis komunitas dengan melibatkan RT, RW dan PKK di wilayah pemantauan; dan (5) Membangun jaringan dengan serikat pekerja dan layanan hotline.

Khusus untuk PBK, pembentukannya dimaksudkan untuk membantu mengawasi keberadaan PRT di lingkungannya, mereka juga didorong untuk melakukan pendekatan atau penguatan kerja PRT itu ke majikannya. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada majikan selaku pengguna jasa, tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik PRT maupun pengguna jasa. Dengan demikian diharapkan pengguna jasa lebih bias menerima dan menyadari keberadaan PRT dengan segala kondisi dan kemampuannya. Melalui model PBK diasumsikan lebih mudah diterima oleh pengguna jasa, karena pengurus PBK terdiri dari warga masyarakat setempat yang dipimpin oleh ketua RT dan melibatkan ibu-ibu PKK.

Pembentukan PBK memang baru sekitar satu setengah tahun lalu, yakni awal tahun 2016. Sebagai model, saat itu dibentuk sebanyak empat PBK PRT dan PRTA di kawasan yang diperkirakan memiliki potensi besar akan keberadaan PRT, yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Kota Malang. Keempat PBK tersebut yaitu: (1) di wilayah Perum Bumi Mondoroko Raya (BMR) RW 14 Desa Banjararum Kecamatan Singosari; (2) Perum Pondok Blimbing Indah (PBI) RW 5 Kelurahan Polowijen dan Kelurahan Purwodadi di Kecamatan Blimbing; dan (3) Perum Griya Shanta RW 12 Kelurahan Mojolangu di Kecamatan Lowokwaru. Basis dari PBK adalah Rukun Warga (RW) artinya satu model PBK memiliki wilayah jangkauan pemantauan satu RW yang meliputi beberapa Rukun Tetangga (RT). Sebagai contoh, PBK di Perum Pondok Blimbing Indah (PBI) di RW 5 memiliki wilayah jangkauan pemantauan 11 RT, dan pada setiap RT dibentuk satu tim yang dimotori oleh ketua RT dan ketua PKK pada RT tersebut.

Kegiatan PBK diawali dengan melakukan pendataan tentang identitas PRT dan pengguna jasa yang berada di wilayah jangkauan pemantauannya, yakni di RW yang bersangkutan. Menurut salah satu koordinator PBK, untuk memulai melakukan kegiatan

pendataan pun tidak mudah, karena tidak sedikit di antara pengguna jasa yang memiliki pandangan negative serta curiga terhadap model PBK. Karena itu, memulai kegiatannya diawali dengan sosialisasi dan proses pendataanya melibatkan perangkat aparat setempat, yakni mulai dari pengurus RT dan ibu-ibu PKK RT setempat. Sosialisasi dimaksud untuk memberikan pemahaman tentang manfaat yang diperoleh pengguna jasa, berkaitan dengan kasus-kasus yang merugikan pengguna jasa, misalnya penipuan dan perampokan oleh PRT, kasus penipuan yang dilakukan oleh calo atau agen PRT dan sebagainya. Dalam proses yang cukup panjang, akhirnya semakin banyak pengguna jasa yang bersedia dilakukan pendataan, meskipun demikian (sekalipun jumlahnya tidak banyak) hingga kini masih ada saja pengguna jasayang enggan untuk didata dengan dalih bahwa penggunaan PRT adalah hak pribadi keluarganya yang tidak bias dicampuri oleh siapapun, karena memang aturan formalnya belum ada.

Setelah pendataan dilakukan, selanjutnya pemantauan dilakukan secara berkala. Tim Pemantau melakukan pertemuan rutin untuk menyampaikan hasil pemantauan. Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa, sampai dengan saat dilakukan pengumpulan data, tidak ditemukan persoalan yang penting dan krusial menyangkut relasi antara PRT dengan pengguna jasa. Sebaliknya justru terjadinya penguatan kesadaran oleh PRT maupun pengguna jasa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu melalui model PBK dapat dilakukan promosi kerja layak bagi PRT menjadi isu penting yang terus diadvokasikan. Beberapa perubahan penting lain dengan keberadaan PBK antara lain: (1) kegiatan promosi kerja layak PRT yang dilakukan diketahui masyarakat luas, terutama PRT dan pengguna jasa; (2) Ketua RT sangat terbantu dengan adanya data PRT di wilayahnya, Adanya kesadaran PRT dan masyarakat untuk melaporkan keberadaan PRT ke ketua RT, Tim pemantau memiliki kepedulian terhadap kondisi dan keberadaan PRT; (3) Terjadinya sharing pengalaman antar PRT, Adanya ikatan yang cukup kuat antar PRT, Munculnya kesadaran di beberapa kelompok untuk membuat arisan, Meningkatnya posisi tawar PRT setelah bergabung dalam organisasi; (4) PRT mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru untuk mendukung pekerjaannya.

Keterbatasan akses PRT terhadap informasi, menyebabkan kesulitan bagi PRT untuk memperoleh informasi dan akses tentang upaya-upaya mengembangkan organisasi atau tergabung dalam organisasi, yang bisa memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan, PRT dan warga Negara. Memang di Surabaya belum ada organisasi untuk PRT, hanya untuk kegiatan PRTA bernama SIWI. Para PRT sendiri ingin sekali gabung dengan organisasi tersebut. Sebaliknya majikan juga kurang setuju dengan organisasi karena harus jelas visi, misi dan tujuan.

Berbeda dengan Malang Raya. Organisasi untuk PRT di Malang Raya sudah terbentuk satu tahun yang lalu dengan nama Pemantauan Berbasis Komunitas (selanjutnya disingkat PBK). PBK merupakan sebuah model yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur yang berpusat di kota Malang. Model PBK dimaksudkan untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap keberadaan PRT yang ada di lingkungannya termasuk hubungannya dengan majikannya. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan penguatan atau pendekatan kerja layak kepada majikan termasuk perlakuannya terhadap PRT.

SIWI adalah sebuah komunitas yang terdiri dari anak-anak perempuan yang bekerja sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga) dan beberapa pendamping dewasa yang berasal dari Samitra Abhaya KPPD, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya (PUSHAM UBAYA) juga dari komunitas seni dan budaya yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi anak-anak yang bekerja pada sektor-sektor pekerjaan terburuk bagi anak. Komunitas SIWI berdiri sebagai wadah bagi anak-anak perempuan untuk belajar berorganisasi dan keterampilan hidup sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup mandiri (*lifeskill*) meskipun pendidikan formal mereka sangat terbatas. Cikal bakal terbentuknya siwi dimulai dari berkumpulnya beberapa Pekerja Rumah Tangga Anak di wilayah Gunung Anyar Tambak Surabaya. Kelompok kecil tersebut sering berkumpul untuk membuat karya-karya berupa kerajinan tangan. Dari kelompok kecil inilah tercetuslah ide untuk membuat sebuah komunitas untuk perempuan-perempuan muda khususnya yang berprofesi sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak. Komunitas ini resmi berdiri pada 10 Oktober 2013. Anggotanya saat ini terdiri dari Pekerja Rumah Tangga Anak *partimer*. Mereka berasal dari Gunung Anyar Tambak Surabaya. Komunitas SIWI berharap dengan adanya komunitas ini bisa menjangkau kawan seprofesi mereka, khususnya yang bekerja *fulltime* dan tinggal di rumah majikan mereka. Mereka yang bekerja *fulltime* lebih rentan tereksploitasi dan terkesklusi secara sosial, karena mereka diperlakukan seperti property majikan. Kemanapun dan melakukan apapun harus mendapatkan persetujuan dari majikan mereka.

Perbedaan antara Pekerja Rumah Tangga Anak *partimer* dan *fulltimer* terletak pada jam kerja mereka. Pekerja Rumah Tangga Anak *partimer* bekerja paruh waktu, karena mereka hampir semua masih bersekolah, maka mereka bekerja setelah pulang sekolah atau sebelum berangkat sekolah. Pekerjaan mereka antara lain mengasuh anak, membersihkan rumah, mencuci baju, mengantarkan anak sekolah. Para *partimer* ini berasal dari wilayah Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Orang tua mereka biasanya berprofesi sebagai satpam perumahan, pekerja rumah tangga di Perumahan, tukang kebun di perumahan, buruh pabrik, tukang

bangunan, buruh cuci. Sedangkan Pekerja Rumah Tangga Anak *fulltimer* bekerja dan tinggal di rumah majikan mereka, potensi jam kerja hingga 24 jam sehari, tanpa hari libur, kecuali libur saat lebaran. Kebanyakan mereka berasal dari luar kota Surabaya. Pekerjaan yang mereka lakukan antara lain, membersihkan rumah, mengasuh anak. Ada beberapa dari mereka jika pagi hingga siang bekerja di rumah majikan, namun jika sore hari diminta untuk bekerja menjaga toko, warung makan milik majikan yang sama. Mereka mendapat informasi bekerja di Surabaya dari keluarga atau kerabatnya, bisa ibu, kakak, bibi, kakak ipar yang sudah terlebih dahulu menjadi Pekerja Rumah Tangga di Surabaya. Jika Pekerja Rumah Tangga Anak yang *partimer* saat sakit bisa pulang ke rumah mereka, para *fulltimer* tidak bisa begitu. Jika sakit mereka ringan akan diberikan obat dari warung, namun jika sakit mereka berat, mereka dipulangkan dengan alasan lebih baik istirahat di rumah saja, agar ada yang merawat. Mereka juga susah untuk mendapatkan layanan kesehatan di tempat kerjanya, karena berasal dari luar kota Surabaya, sehingga mereka dianggap tidak pantas mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan dari Kota Surabaya, terlebih mereka belum memiliki Identitas berupa KTP. Sehingga seluruh layanan dasar itu bisa mereka terima jika secara kebetulan mendapatkan majikan yang baik dan peduli pada hak-hak Pekerja Rumah Tangganya.

Dari Pekerja Rumah Tangga Anak ini bisa ditarik beberapa kesamaan yaitu, mereka yang menjadi Pekerja Rumah Tangga Anak berasal dari keluarga Pekerja Rumah Tangga. Alasan mereka bekerja kebanyakan adalah untuk membantu kondisi ekonomi orang tua, meskipun beberapa ada juga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka, anggapan bahwa bekerja di kota adalah sebuah hal yang keren untuk orang daerah. Beberapa dari mereka lebih memilih bekerja menjadi Pekerja Rumah Tangga Anak ini sebagai pilihan terakhir daripada harus dinikahkan di usia remaja. Pola pikir orang tua yang menganggap bahwa anak merupakan aset mereka, sehingga saat kondisi ekonomi keluarga dirasa sulit, mereka tidak segan untuk menyuruh anak perempuan mereka untuk menikah di usia remaja, karena jika anak mereka sudah menikah, maka seluruh tanggungjawab mereka sebagai orangtua untuk mengasuh sudah selesai. Namun jika si anak tidak ingin menikah, maka mereka diwajibkan untuk membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja, meskipun itu menuntut mereka untuk bekerja di luar daerah mereka. Salah satunya dengan menjadi Pekerja Rumah Tangga Anak dengan segala resikonya.

Dengan adanya komunitas SIWI ini mereka bisa berkumpul bersama, berbagi cerita tentang keseharian mereka, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka miliki. Tujuan utama komunitas ini adalah memutus rantai Pekerja Rumah Tangga Anak dan meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka mempunyai keterampilan yang lebih, sehingga mereka

memiliki nilai tawar yang lebih baik untuk pekerjaan mereka selanjutnya dan tidak lagi menjadi pekerja rumah tangga. Di dalam Komunitas SIWI ini pun mereka diajarkan membuat berbagai jenis kerajinan tangan dan makanan yang bisa mereka jual ke teman-teman atau tetangganya sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Diharapkan dari kegiatan tersebut bisa membuka peluang kerja baru untuk mereka sehingga mereka tidak lagi bekerja sebagai PRTA.

Di sisi lain, PRTA justru banyak menjadikan teman-temannya tempat untuk menceritakan permasalahan kerja yang dihadapinya. Hal ini dimungkinkan karena anak-anak lebih leluasa menceritakan segala macam permasalahannya kepada teman sebayanya, sehingga paling tidak bebannya akan dapat berkurang, disamping mungkin saja akan ditemuinya jalan keluar terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. SIWI sebagai lembaga yang mempunyai program intervensi untuk mereka, maka kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengadukan permasalahannya.

5.3 Pilihan Perempuan menjadi PRT/PRTA

Pilihan bagi perempuan menjadi PRT/PRTA di Surabaya, merupakan suatu tindakan yang rasional, memandang bahwa **memilih** itu sebagai tindakan yang bersifat rasional. Pilihan secara rasional menjadi PRT/PRTA disebabkan oleh kondisi kemiskinan, dan alasan ekonomi. Meskipun, pilihan rasional juga memandang bahwa rasionalitas itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Artinya, ada kalanya suatu tindakan yang sudah diperhitungkan secara rasional, ternyata memiliki akibat yang tidak diharapkan (PRTD Dewi), bahkan akibat tersebut sama sekali tidak diperhitungkan atau diantisipasi sebelumnya. PRTD Dewi harus membagi antara jam belajar, kuliah, memasak, membersihkan rumah dan menjaga anak majikan. Dampaknya PRTD sangat sedikit memiliki waktu istirahat. Upah yang diberikan hanya Rp 300.000/bulan, meskipun uang SPP sejumlah Rp 400.000/bulan dibayar oleh majikannya. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan rasio manusia didalam memperoleh dan mengolah informasi. Dengan mengikuti pilihan rasional tersebut, maka PRT yang sukses maupun gagal di daerah tujuan sesungguhnya merupakan resiko dari pilihan rasional mereka ambil.

Dengan cara itu, para PRT/PRTA akan "menjatuhkan" pilihan yang mereka yakini dapat memaksimalkan keuntungan yang mereka harapkan. Keputusan individual untuk melakukan sebuah keputusan, guna meraih hasil yang maksimal yang diinginkan adalah merupakan tindakan rasional.

Adanya kenyataan bahwa masyarakat pedesaan dengan segala kemiskinannya, yang tidak punya peluang dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan sosial-ekonominya di daerah

asal, dan kemudian memutuskan untuk bermigrasi meninggalkan keluarga dan kerabatnya itu adalah merupakan tindakan yang rasional. Artinya, seseorang memutuskan untuk bermigrasi ke daerah yang dituju adalah merupakan hasil pilih-memilih diantara berbagai alternatif peluang yang tersedia dan tentu saja juga yang paling mungkin ia lakukan diantara tekanan situasi (struktur) dan kondisi (kultur) di daerah asal.

PRT/PRTA melakukan migrasi karena ditentukan oleh tingginya permintaan pasar kerja di Surabaya. Pilihan menjadi PRT/PRTA merupakan kesempatan kerja yang luas menyebabkan tingginya permintaan terhadap pekerja tanpa *skill* dan pendidikan yang tinggi

Dalam penelitian ini, kenapa seorang anak memilih menjadi PRT baik yang dialami oleh Aisyah dan Yesy, pada umumnya faktor kemiskinan daerah asal. Seperti yang dialami Aisyah yang berasal dari Sampang Madura, mengingat kabupaten Sampang merupakan kabupaten yang termiskin di Jawa Timur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 jumlah warga miskin di Sampang mencapai 30,21% dari jumlah penduduk 871.534 jiwa. Sedangkan pada 2016 berada pada angka 28,21 % dari 883.282 jiwa. Meskipun data yang terbaru dari BPS untuk tahun 2017 belum terbit, diperkirakan sampai penelitian ini berlangsung kabupaten Sampang merupakan kabupaten termiskin di Jawa Timur.

Selain factor kemiskinan, juga pada akses, infrastuktur yang kurang mendukung bagi Aisyah memutuskan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yauti SMA. Dari rumah ke sekolah SMA sekitar 7 km. Belum lagi jalannya yang rusak parah. Alat transportasi yang kurang memadai menuju ke sekolah juga tidak dimiliki oleh Aisyah (baik sepeda *onthel* maupun sepeda motor). Pengambilan keputusan menjadi PRTA bagi Aisyah merupakan keputusan yang tepat.

Pekerja rumah tangga (PRT) cenderung bekerja ketika masih sangat muda, misal PRT dari majikan Myta yang bekerja mulai usia 17 tahun, PRTA Aisyah dan Yesy. Namun ada juga PRTD Dewi, dimana orang tua Dewi mengirimanaknya ke orang lain yang dianggap sebagai keluarga dengan harapan bias memberikan pendidikan dan tempat untuk hidup yang pantas kepada anakmereka. Sebagai balasannya, anak tersebut membantu pekerjaan rumah tangga. Menurut tradisi orang Jawa disebut *'ngenger'*, dan dianggap PRT sebagai anggota keluarga bukan pekerja.

Anak perempuan lebih mungkin putus sekolah ditingkat SMP dibandingkan anak laki-laki. Banyak anak perempuan sebagai PRTA (seperti Aisyah dan Yesy) terpaksa bekerja karena kondisi ekonomi, akses ke sekolah cukup jauh dan masalah keluarga (PRTA Aisyah), sehingga mereka kehilangan kesempatan terhadap pendidikan. Pilihan menjadi PRT menjadi kesempatan untuk mendapat uang dan memperoleh pengalaman diluar kamponghalaman atau

daerah mereka. Nampaknya faktor-faktor budaya, ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam mempengaruh pilihan pekerjaan mereka. Pekerjaan rumah tangga adalah salah satupilihan pekerjaan yang paling jelas bagi anak perempuan miskin yang tidak mempunyai keterampilan dan yang terbatas pendidikannya.

5.4 Minimnya Perlindungan Terhadap PRT/PRTA

Secara umum, keberadaan PRT di Surabaya dan Malang Raya kurang mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun pemenuhan kebutuhan secara layak. Padahal, sebagai pelaku kerja kerumahtanggaan mereka memiliki peran produktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk permasalahan dan perlakuan yang tidak disadari oleh PRT itu sendiri.

Sampai saat ini perlindungan hukum dan pengakuan hak terhadap PRT masih sangat lemah. Kondisi kerja PRT sepenuhnya tergantung kepada pengguna jasa (majikan). Apabila pengguna jasa memperlakukannya dengan baik, maka PRT memiliki dan menerima kondisi kerja yang wajar. Demikian pula sebaliknya. Banyaknya kasus yang menimpa PRT tersebut salah satunya bersumber dari lemahnya perlindungan terhadap mereka.

Secara hukum mereka tidak termasuk dalam kategori pekerja sektor formal, sehingga tidak terlindungi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini juga belum memadai sebagai acuan untuk mengatur PRT, karena tidak menyebut PRT secara eksplisit sebagai tenaga kerja. Walaupun sudah ada Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah pada tanggal 16 Juni 2011, namun di Indonesia belum dapat dijadikan dasar hukum karena belum diratifikasi ke dalam hukum positif Negara kita. Ada beberapa lemahnya perlindungan terhadap PRT/PRTA diantaranya :

1. **Tidak ada kontrak**

   Kadang-kadang ada perjanjian lisan tentang jenis tugas yang harus mereka kerjakan, dan gaji yang akan mereka bayarkan, tetapi hanya sedikit yang diberi tahu berapa jam mereka harus bekerja dalam satu minggu, apakah mereka akan diberi hari libur atau tidak. Uraian yang jelas tentang durasi dan kondisi dari masa percobaan, jumlah hari kerja, jumlah jam kerja, jam istirahat, waktu lembur, waktu libur, jumlah upah, cuti, syarat-syarat pengakhiran pekerjaan, serta prosedur penyelesaian perselisihan.
2. **Jam kerja yang tidak jelas dan tidak ada waktu istirahat serta tidak ada hari libur**

PRT Dewi istirahat hanya 6 jam. Kebanyakan PRT bekerja tujuh hari perminggu tanpa hari libur. Bagi PRTD *live-in* di rumah majikan mereka, batasan antara kerja dan istirahat sering amat sangat kabur. Ini secara khusus benar, ketika PRT yang menjaga anak tidur di kamar, PRTD akan menjaga anak majikan sampai tingkat kebutuhan anak. Walaupun kebanyakan PRT diperbolehkan pulang ke keluarga mereka untuk satu atau dua minggu pada saat lebaran.

3. **Hambatan untuk bergabung dengan serikat PRT**

Sejumlah PRT mengalami pembatasan atas kebebasan bergerak dan berasosiasi mereka. Kondisi mereka menjadi kurang ada interaksi karena mereka tidak boleh meninggalkan rumah majikan mereka, tidak ada libur, dan tidak bisa hadir dalam pertemuan dan acara-acara sosial laindiluarrumahmajikan, seperti 17 Agustusan, pengajian dan bahkan di kelurahan Babatan ada tradisi bersih desa.Terdapat tradisi sedekah bumi di kelurahan Babatan. Makna sedekah bumi , supaya warga setempat mendapat keselamatan, kesehatan, dan keberkahan. Sedekah bumi merupakan tradisi warisan leluhur. Tradisi ini merupakan tradisi tahunan dan dirayakan setiap satu tahun sekali yang bertepatan dengan tahun baru Islam. Pada umumnya yang dating diacara bersih desa adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu menyiapkan segala keperluan untuk acara bersih desa, tetapi bapak-bapak untuk persiapan melaksanakan doa. Acara bersih desa ini dipimpin oleh Kyai atau Ustand. Bagi PRT hanya menyiapkan masakan untuk masakan upacara bersih desa. Pada umumnya yang mengantarkan masakan ke RT adalah majikan perempuan. Hampir jarangada interaksi antar PRT di kelurahan Babatan. Hampir sama juga di kecamatan Gubeng dan Tambaksari, interaksi antar PRTjarang terjadi karena dibatasi jumlah jam untuk pergi. Seandainya pergi akan dibatasi oleh waktu.

Dampak dari sangat kurangnya interkasi antar PRT, banyak PRT tidak mengetahui kesulitan sesama PRT, dan tidak tahu mereka berhak untuk bergabung dengan serikat buruh. Para majikan nampaknya kurang setuju dan mencegah PRT bertemu dengan para PRT yang lain, dengan alasan takut gossip, menjelekkan majikan, membandingkan pekerjaan dengan PRT yang lain, mencari pekerjaan yang baru (*Profil majikan PRTD Febri dan Myta*). Hampir disekitar perumahan di wilayah kecamatan Wiyung, Tambaksari dan Gubeng, sangat jarang sekali ada pertemuan antar PRT. Meskipun di wilayah kecamatan Gubeng, terdapat **"Taman Pembantu"**,biasanya hanya PRT dengan temannya pergi berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya maupun kebutuhan majikan, bukan untuk mengorganisir gerakan

memperjuangkan hak-hak PRT. Pembatasan-pembatasan yang ditempatkan oleh para majikan kepada para PRTmereka, dikhawatiran majikan melakukan tuntutan kepada majikan yang hal ini menyebabkan akan membuka aib tersendiri bagi majikannya.

4. **Standar hidup yang tidak layak**

   Sejumlah besar PRT hidup dengan kondisi yang tidak layak dan kurang adanya fentilasi udara. Sejumlah dari mereka tidak tidur dikasur (seperti PRTA Katmini dan majikan PRTD Myta), dan dipaksa untuk tidur di gudang atau kamar-kamar lain yang tidak layak.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang terkumpul dan sudah dilakukan analisis maka dapat kita simpulkan bahwa :

PRT adalah produk sosial, ia lahir ditengah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, meskipun demikian mereka telah berjasa mambantu majikan mengerjakan tugas-tugas kerumahtanggaan. Keberadaan PRT dewasa ini semakin diperlukan sebagai akibat perubahan bentuk kehidupan yang semakin kompleks karena setiap anggota keluarga memiliki aktivitas di luar rumah yang menyebabkan tidak berjalannya sistem dalam rumahtangga. Secara umum terjadi banyak pelanggaran yang dialami oleh PRT, di antaranya tentang haknya sebagai pekerja maupun haknya sebagai perempuan. PRT umumnya bekerja terlalu lama dalam sehari dengan beban kerja yang acapkali melampau batas kemanusiaan. Waktu kerja yang begitu lama tanpa istirahat membuat PRT senantiasa kelelahan dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Masalah ini diperberat ketika PRT tidak mendapat makanan yang layak dan bergizi, tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang baik dan murah, dan tidak diberikan tempat yang layak untuk beristirahat. Kasus lain adalah pemberian gaji terlambat dibayar sebagian atau bahkan tidak dibayar sama sekali ketika PRT melakukan kesalahan. Sebaliknya, persoalan-persoalan yang merugikan majikan juga kadang muncul sebagai akibat dari perilaku PRT atau penyedia jasa yang berperan sebagai calo atau agen PRT. Banyak kasus memperlihatkan adanya majikan yang tertipu oleh PRT, seperti kasus pencurian atau perampokan yang melibatkan PRT dengan komplotannya. Kasus lain yang sering muncul dan menjadi keluhan majikan adalah adanya PRT yang baru bekerja satu atau dua minggu kemudian minta keluar atau diambil paksa oleh agen penyedia PRT yang membawanya.

Keberadaan PBK merupakan sebuah model yang dibangun dan dikembangkan oleh LPKP Jawa Timur dimaksudkan untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap keberadaan PRT yang ada di lingkungannya termasuk hubungannya dengan majikannya. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan penguatan atau pendekatan kerja layak kepada majikan termasuk perlakuannya terhadap PRT. Pembentukan Model PBK sebenarnya hanyalah merupakan salah satu dari beberapa pendekatan dan strategi yang dilakukan LPKP, yang ruang lingkup dari program kegiatannya adalah melakukan promosi kerja layak bagi PRT dan penghapusan PRTA. Dengan demikian diharapkan nantinya segala hak dan kewajiban PRT

dan pengguna jasa semakin jelas, terukur serta terpantau sehingga relasi antara PRT dengan pengguna jasa semakin baik dan harmonis.

Saran

UU Ketenagakerjaan perlu direvisi untuk mengakui hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja juga. Tanpa perlindungan hukum yang sama para pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap eksploitasi. Perlindungan PRT tetaplah dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai pekerja rumah tangga Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah selama proses penulisanundang-undang, Pemerintah Indonesia harus secara aktif meminta konsultasi dan partisipasi dari semua pihak yang relevan, termasuk asosiasi dan kelompok-kelompok pendukung pekerja rumah tangga, perwakilan organisasi majikan dan agen-agen pekerja rumah tangga.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum* : Suatu Kajian Filisofis dan Sosiologis, Jakarta: Chandra Pratama

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2002. Jakarta : Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode 1996-2001

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003, *Peta Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta : BAPPENAS.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004, *Kebijakan dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Sosial Bagi Masyarakat Miskin*, Jakarta : BAPPENAS

Bojer, Hilde, 2003. *Distributional Justice: Theory and measurement,* London: Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE.

Freeman, M.D.A, 2001. *Lloyd's Introduction To Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell Ltd

Friedman, J. 1979. Urban Poverty in America Latin, Some Theoritical Considerations, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (ed). 1986.

Geertz, Hildred. 1983. *KeluargaJawa* (Terjemahan). Jakarta : Grafiti Pers

Hartoko, Dick. 1985. *Strategi Kebudayaan* (Terjemahan). Yogyakarta : Kanisius

Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta : Balai Pustaka

Mulder,N. 2001. *Ruang Bathin Masyarakat Indonesia* (Terjemahan). Yogyakarta: LKiS

Poerwadarminto. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Program Peduli, 2015. *Mari Memahami dan Melindungi*, Surabaya : Samitra Abhaya dan Sanggar SIWI

Sajogyo. 1988. *Masalah Kemiskinan di Indonesia. Antara Teori dan Praktek.* Mimbar Sosek Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Suseno, F. Magnis. 2001. *Etika Jawa.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Syaefudin, dkk. 2003. Menuju Masyarakat Mandiri, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Utami, Andri Yoga., 2005. "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarjinalkan", Jurnal Perempuan 39.

Venny, Adrianai.,2005."Pekerja Domestik dari Masa ke Masa", Jurnal Perempuan 39

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

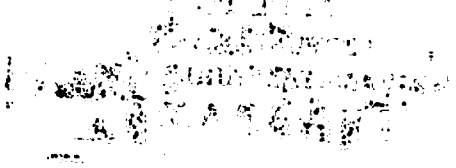

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Artikel Proceeding Scopus ICoCSPA

Tri Joko Sri Haryono
Sri Endah Kinasih
Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Keywords: Child Domestic Workers, Exclusion, Exploitation

Abstract: This study explains the access limitations of child domestic workers to the information, which caused them to have difficulties in obtaining information and access regarding an efforts to develop organisations or join organisations that able to advocate their rights as women, children and citizens. The purpose of this study is to explain the SIWI community assistance who have concern for the children's condition who are working in the worst jobs sectors. This research is descriptive research by using the qualitative method. The research location is in Surabaya by conducting observation, in-depth interview and Focus Group Discussion (FGD) as its data collection method. The informants for this research were the child domestic workers, the community leaders, Department of Human Resource Development and Culture, Child Protection Institution, Department of Social Services, Labour, and Transmigration and Department of Education. The results of this research show that those child domestic workers are prone to the exploitation and social exclusion because they are treated like an employer's property. Through this SIWI community, they can gather together, share stories about their daily lives, knowledge and skills to gain information and access towards better jobs and no longer become domestic workers anymore. This study implies that the access to basic services and policy advocacy at various levels must be enhanced to ensure the realisation of child labour protection.

Introduction

In relating with the type of domestic workers, it can be grouped into two. The first is the adult domestic workers and the second is the child domestic workers. The child domestic workers then also classified into two, namely child domestic workers for local needs or domestic (Irawaty, D 2011). The second is for foreign countries or overseas where the child domestic workers will be sent to Vietnam (Gribble & Tran, 2016), Mexico, and Philippines (Espinosa, 2016) which can be categorised as the migrant workers. There also the differentiation from the origins of CDW that is the one who still has family relations and the one who is not.

According to ILO (2013), there were 67 million domestic workers around the world, and 83% of that is women. While in Indonesia, According to National Labour Force Survey there were 2.555.000 domestic workers in 2013 then increasing to 4.034.290 in 2015 and from this total 74% is women (ILO 2017). The ILO data is the result of a study on the estimation the total of domestic workers populations based on National Labour Force Survey, which available in the report with a title *Toward a Better Estimation of Total Population of Domestic Workers in Indonesia*. Based on an ILO survey that conducted in Jakarta in 2016 there are 4.5 million local domestic workers who are working in the country. The number will increase and in line with the level of economic growth in Indonesia. These increasing numbers show that domestic workers are an essential part of the society social and economic order.

The increase in the number of domestic workers shows that the tendency of the local worker's presence is needed and becomes an employment field that able to absorb a lot of workers, especially women (Venny, 2005, p. 4). This work has the prospect to become a regular job. Unfortunately, however, the increase in the number does not make they have robust bargaining power. They are still far from prosperous life and far from having a decent working condition (ILO-IPEC, 2004, pp. 109-110).

Socially, the domestic workers have lower positions towards their relations with their employers (Muryanti, 2005, p. 9). It can be seen in the condition of the people who are more familiar with calling the domestic workers as helpers or rather than calling them as domestic workers. This situation indicates that the community is still not genuinely acknowledge the vital role of domestic workers and always looking down on them (Utami, 2005, pp. 46- 47). When it is viewed from the significant increase in the number of domestic workers and most of them are experiencing unfavourable work situations, they are able to reverse the situation. Thus, consolidating the power of domestic workers through unions becomes an answer. The organisation experience has been best exemplified by the workers. Through the unions, the workers could build awareness regarding decent work and gather the power to fight for it. The establishment of the International Domestic Workers Federation (IDWF), an affiliate of domestic workers' organisations in 54 countries, is evidence that domestic workers still need support in doing a movement.

The right to associate for domestic workers and child domestic workers can be found in article 1, paragraph 3 of Act no. 21 the year 2000 about Trade Unions. The assistance that conducted by National Network Advocacy for Domestic Workers with ILO Jakarta found that there are 13 domestic workers organisations spread in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Lampung, Makasar, Yogyakarta and Semarang, five of them have become unions.

Limitations access of domestic workers to the information make it difficult for them to obtain the knowledge regarding how to develop organisations or join organisations that can fight for their rights as women, domestic workers and citizens. In Surabaya there is no organisation for domestic workers, there only community called SIWI that become a platform for CDW activities. SIWI Community is a community that consists of girls domestic workers. This community provides skills and crafts training in order to break the chain and not to work as domestic workers. It is because if the parents become a domestic workers then their children will follow the same path. Besides that, the SIWI Community has also informed their member regarding gender injustice that faced by women and children.

Accessing Information Training Against Gender Inequality as Efforts to Protect Child Domestic Workers in SIWI Community

Community participation which developed to avoid the act of exclusion from any group is perceived as an indicator of social involvement in

the community development program (Shortall, 2008, p. 452). Community development is characterised by avoiding the labelling attitude form several groups or society who are socially different with the dominant culture, and it is essential to attract participation from all stakeholders. According to Cornwall (2008, p. 296), the concept of the involvement is beneficial to invite all parties to take part in the activity.

SIWI is a community consists of girls who work as domestic workers and some adult associate from Samitra Abhaya KPPD, Center for Human Rights Studies of Universitas, also from the arts and cultural community who have concern for children condition who works in the worst jobs sectors. The SIWI community officially established on October 10, 2013, served as a place for girls to learn, to organise and practice their life skills for their survival, although their formal education is insufficient. The embryo of SIWI formation starts with gathering several Child Domestic Workers in the area of Gunung Anyar Tambak Surabaya.

This small groups often gather to make handicrafts. Further, the idea to create a community for young women especially those who work as Child Domestic Workers starts to appear. The members consist of part-time Child Domestic Workers who come from Gunung Anyar Tambak Surabaya. The SIWI community hopes that they can reach out to the other friends who work in the same fields, especially the one who work full-time and live in their employers' house. Since that, they are more vulnerable to be exploited and socially excluded, and treated like an employer's property. Wherever and everything that they want to do must receive approval from their employer.

The difference between part-time and full-time child domestic workers lies in their working hours. The part-time one, they work after school or before going to school. Their jobs include babysitting, house cleaning, washing clothes, dropping off and pick up their employer's children to school. Their parents usually work as housing security guards, domestic workers, gardeners, factory workers, builders and laundry workers. In contrast, the full-timer one works and stay in their employer's house. There is a high probability that they will works for 24 hours a day, without any day-off except when there is an Eid holiday. Most of them are coming from outside Surabaya such as Malang, Madura, Jombang, Nganjuk, Blitar and Kediri. The works that they do are cleaning the house, babysitting. Some of them are working from morning until afternoon in their employer's home, then in the evening, they were asked to take care of the store such as the food stalls. They receive this job information from their family or relatives, such as mother, sister, aunt, a brother-in-law who already becomes domestic workers in Surabaya.

The children who work part-time domestic workers if they are sick they could go back home. On the contrary, the full-timer child domestic workers if they have mild sickness they only receive the medicine, just when they have severe illness, then they are allowed to go home. They are hardly difficult to obtain health services in their working place since that most of them were coming from outside Surabaya and they also do not have the identity card.

From this child domestic workers there similarities are that their parents also works as the domestic workers. The reason why the children are willing to work is mostly to help their parents and improve the economic conditions. Although some of the children also work to fulfil their lifestyle needs. There is an assumption that working in the city is a cool thing for people who come from the village or suburbs area. Some of them prefer to work as Child Domestic Workers as their better choice rather than being married at their young age. Since that their parents assume that their child is an asset, so when the family economic conditions are difficult, they are not reluctant to send their daughters to marry at a young age. It is because if their child is married, then all their responsibilities as parents are done. However, if the children do not want to get married, then they are required to help the family economy by working, even though it needs them to work outside their region as a child domestic worker including facing with all the risks.

The impact of the lack of interaction among child domestic workers, many of them are unaware of the difficulties of their fellow child domestic workers and do not know that they have rights to join the union. Employers seem to disagree and prevent child domestic workers from meeting with the other child domestic workers, because of they will gossip and vilify their employers, compare their working environment to other domestic workers and find new jobs. Almost in the housing complex in Gunung Anyar Tambak Surabaya, the meeting between domestic workers are very rare to find. Generally, only child domestic workers with their friends go shopping to fulfil their needs as well as the employers need, not to organise the movement to fight for their

rights as child domestic workers. Those employers restrictions are because they are afraid that the child domestic workers would ask unfulfilled demands and expose their weakness. On the other hand, child domestic workers make a lot of friends and have a place to tell their works problems. It is possible since that the children are freer to say all kinds of issues to their peers, this interaction will reduce their burden. Moreover, it is possible to find the best way out of their problem. SIWI as an institution that has an intervention program open vast opportunity for the child domestic workers to report and tell their problem.

SIWI Community has several approach or strategy those are (1) outreach and organising the child domestic workers. (2) Increase the knowledge and skills of domestic workers through training and provide education sessions. (3) Promotes decent work for child domestic workers through social media, religious leaders and government. (4) Conduct monitoring of domestic workers community by involving the head of the housing complex, and Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Fostering Family Welfare) within the monitoring area. (5) Build networks with unions and hotline services.

The SIWI Community is a model for monitoring or control towards the presence of child domestic workers in their environment, including their relationship with their employers. Besides that, the intention is to provide empowerment or educate the employers how to provide a decent work environment including the treatment to the child domestic workers. The establishment of the SIWI community is just one of several approaches and strategies to promote a proper work environment, and the eliminates or reduce the child domestic workers as a profession.

Conclusion

SIWI Community is a model that built and developed by Samitra Abhaya KPPD. The intention is to monitor or control the existence of domestic workers in their environment including their relationship with their employers. It is also intended to provide empowerment and educate the employers regarding a decent work environment approach including the treatment towards child domestic workers. The establishment of SIWI community model has its own activities programs to conduct the promotion and eliminate or reduce the number of child domestic workers. Therefore, it is expected that the rights and responsibility of domestic workers and the employers will be more transparent, measurable and monitored which resulting on the harmonious and better relationship between the child domestic workers and the employers.

Acknowledgement

This research was supported by the Ministry of Research, Technology and Higher Education Indonesia.

References

Utami, Andri Yoga., 2005. "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarjinalkan", Jurnal Perempuan 39.

Cornwall, Andrea, 2008. "Unpacking 'Participation': models, meanings and practices", *Oxford University Press and Community Development Journal*. 43(3), pp. 269–283

Espinosa, S.A., 2016. Diaspora philanthropy: The making of a new development aid?. *Routledge*, 5(3), 361-377.

Gribble, C., & Tran, L.T., 2016. Connecting and reconnecting with Vietnam: Migration, Vietnamese overseas communities and social media. In: C. Gomes (ed). *The Asia-Pacific in The Age of Transnational Mobility: The Search for Community and Identity on and through Social Media*. UK and USA: Anthem Press.

ILO, 2013. *Technical report: The estimation of total domestic workers in Indonesia*. Jakarta: ILO.

ILO, 2017. *Toward a better estimation of the total population of domestic workers in Indonesia.* Jakarta: ILO.

ILO-IPEC, 2004 Bunga-bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. Jakarta: kantor Perburuhan internasional

Irawaty, D., 2011. *Redefining cultural practices and reconstructing a colonial legacy: Foundation for female household workers' empowerment in Indonesia*. Berlin: Dr Verlaag.

Muryanti, 2005. Upaya Perlindungan PRT, Jurnal Perempuan No. 39: Pekerja Rumah Tangga. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Shortall, Sally (2008). "Are rural development programmes socially inclusive? Social inclusion, civic engagement, participation, and social capital: Exploring the difference, *Journal of Rural Studies*, 24, pp. 450–457.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Venny, Adrianai., 2005. "Pekerja Domestik dari Masa ke Masa", Jurnal Perempuan 39

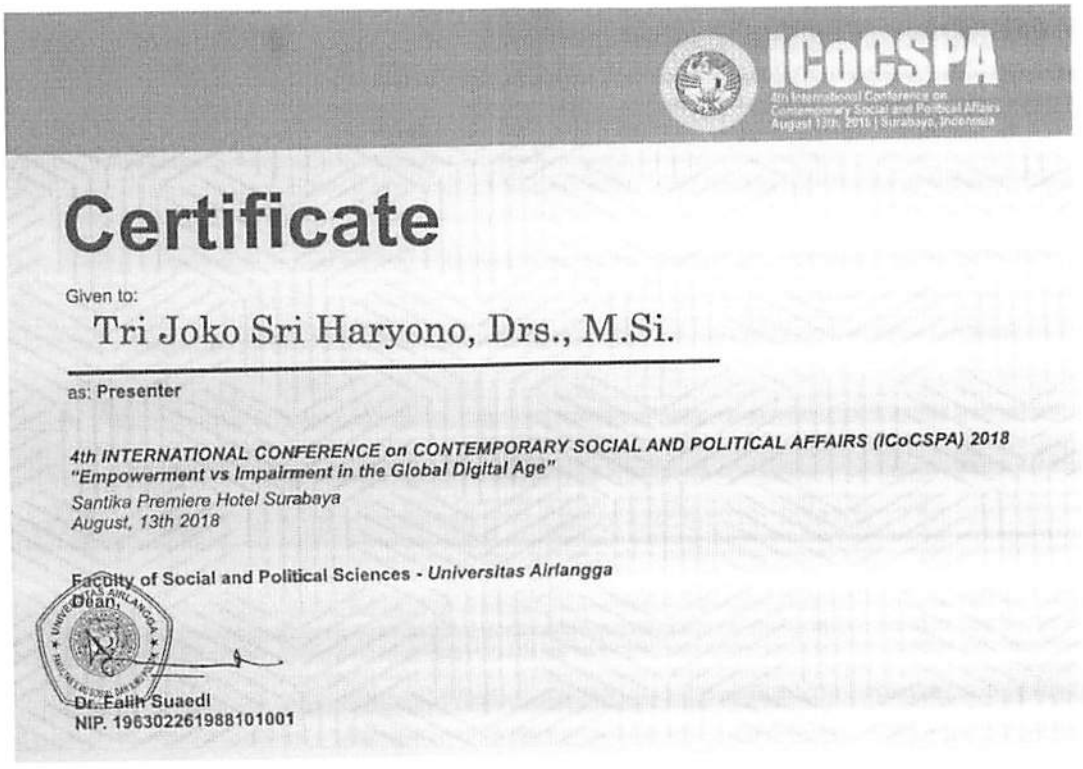

ICoCSPA
4th International Conference on Contemporary Social and Political Affairs
August 13th, 2018 | Surabaya, Indonesia

Certificate

Given to:

Tri Joko Sri Haryono, Drs., M.Si.

as: Presenter

4th INTERNATIONAL CONFERENCE on CONTEMPORARY SOCIAL AND POLITICAL AFFAIRS (ICoCSPA) 2018
"Empowerment vs Impairment in the Global Digital Age"
Santika Premiere Hotel Surabaya
August, 13th 2018

Faculty of Social and Political Sciences - *Universitas Airlangga*
Dean,

Dr. Falih Suaedi
NIP. 196302261988101001

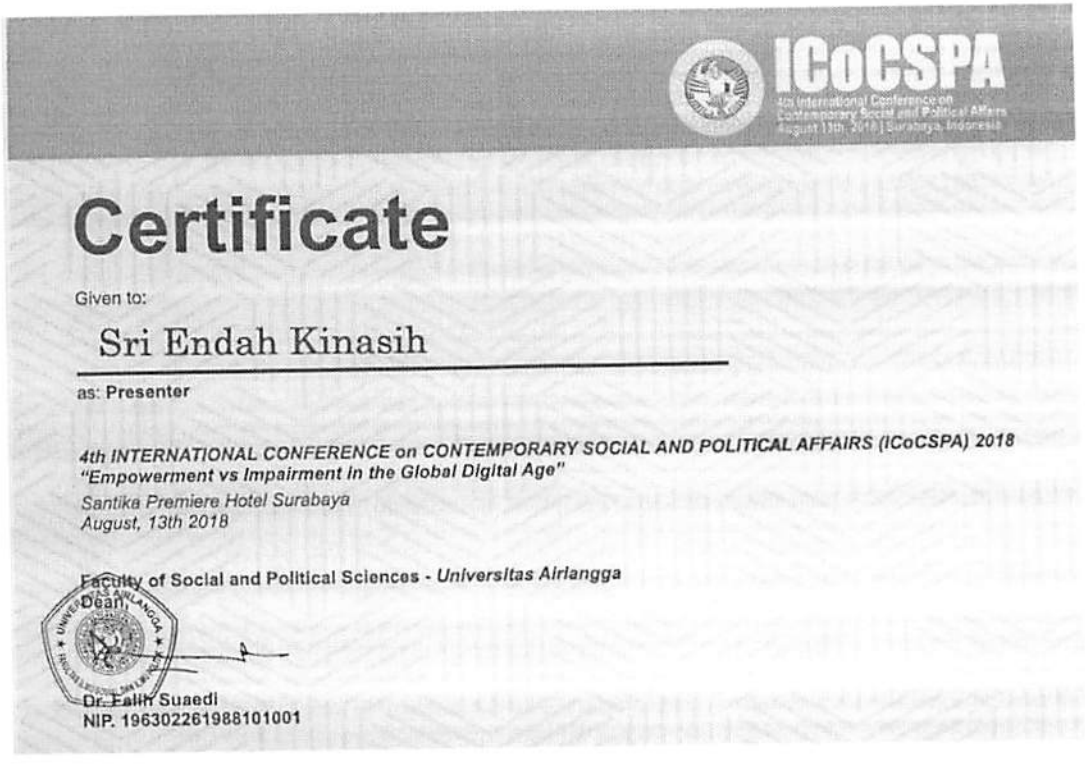

ICoCSPA
4th International Conference on Contemporary Social and Political Affairs
August 13th, 2018 | Surabaya, Indonesia

Certificate

Given to:

Sri Endah Kinasih

as: Presenter

4th INTERNATIONAL CONFERENCE on CONTEMPORARY SOCIAL AND POLITICAL AFFAIRS (ICoCSPA) 2018
"Empowerment vs Impairment in the Global Digital Age"
Santika Premiere Hotel Surabaya
August, 13th 2018

Faculty of Social and Political Sciences - *Universitas Airlangga*
Dean,

Dr. Falih Suaedi
NIP. 196302261988101001

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 2. Artikel Scopus International Social Science Journal

Exploitation of Child Domestic Workers through the *Ngenger* Culture in Javanese Society

Drs. Tri Joko Sri Haryono., M.Si
Sri Endah Kinasih, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

This study explains a Javanese culture called "ngenger" that has an impact on exploitation. The purpose of this study is to understand this Javanese culture from the perspective of Gender Anthropology. This research is a descriptive study that using a qualitative method. The location of the study was in Surabaya and the city of Malang, East Java by collecting data in the form of observations, in-depth interviews and focus group discussions. The informants for this study were child domestic workers, parents of child domestic workers, parents of recipients of child domestic workers, National Population and Family Planning Board (BKKBN), Social Services, Women and Child Protection (KBPPPA DINSOS), Child Protection Institute (LPA), the East Java Community and Development Assessment Institute (LPKP), SIWI community and community leaders. This research is, first, the *ngenger* children that employed as the domestic workers are included in the criteria of exploitation since they almost lose all of their rights as a child. Secondly, the forms of *ngenger* children exploitation are having low wages, lacking bargaining power, being obedient, lacking the courage to claim their rights, not daring to complain to anyone, and continuing to serve the parents of the recipient. Third, the condition where the *ngenger* children don't have a bargaining position toward the recipient's parents is precisely what exists as a form of exploitation. Fourth, the relationship between children and the recipient's parents is a patron-client relationship containing economic relations where there must be benefits to be achieved, and this will have an impact on efforts to exploit children. The implication expected from this study is that the provincial and regional governments who in charge of children issue will include the issue of child labor and child domestic workers' protection that projected in "ngenger children" in the draft regulation on the fulfillment of children's rights by carrying out the process of returning the child domestic workers' needs of learning and playing. Therefore, the community is also expected to help the government in mapping the issue of *ngenger* culture that has grown in Surabaya and Malang City.

Keywords : *ngenger*, domestic workers (PRT) / child domestic workers (PRTA), patron- client, bargaining position

INTRODUCTION

In relation to the type of child domestic workers (PRTA), they are divided into two types, namely domestic workers for local or domestic needs (Irawaty, 2011; Gutierrez-Rodriguez, 2009) and child domestic workers for overseas needs in various countries such as Vietnam (Gribble & Tran, 2016), Mexico, Philippines (Espinosa, 2016), India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal and Bangladesh (Oommen, 2014) and China (Wong, 2007), Malaysia (Othman & Rohani, 2014), and Hungary, Slovakia, and Czech (Verwiebe, Reinprecht, Haindorfer, & Wiesboeck, 2017) categorized as migrant workers. There is also a difference between PRTA from their origins, namely domestic workers who still have family relations and child domestic workers who have no family relations.

This research is different from the previous research which mainly examined the issues of protection, sexual exploitation, verbal violence and physical violence experienced by PRT/PRTA, and child trafficking through child domestic workers job (Ruhm, 2011; Waldfogel & McLanahan, 2011; Ally, 2011; Fechter, 2007; Utama & Kusumawati, 2015; Anggraeni, 2006; Gutierrez-Rodriguez, 2014; Irawaty, 2011). The local culture point of view is still rarely examined, which actually perpetuates the exploitation of child domestic workers until now. It happened in Javanese culture, with the term "ngenger" where there is an element of child domestic exploitation that is covered by child domestic worker's protection in the local culture.

This study examined *ngenger* as the part of Javanese culture towards PRTA exploitation. Why does the current *ngenger* culture arise for discussion? First, the culture of *ngenger* is regarding the future of children who are still in the process of growth and development, and also requires protection from all forms of exploitation and physical, psychological and social violence. Second, the problems are faced by PRTA as marginal children, and it's also in consideration that children's rights are also part of human rights that must be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, families, communities, the government and the state, as mandated by Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Third, when referring to the Convention on the Rights of the Child (CRC), which contains articles on children's rights, including the right to survival, the right to grow and develop, the right of protection from all forms of exploitation and participation rights, children who are employed as PRTA fall under the criteria of economic exploitation and other rights violations. PRTA type of work is included in exploitative criteria regarding children rights, which are the long working hours, unclear wage standards, lost opportunities for school and play, no chance of holidays, no opportunity to receive education, living separately with family, and at risk of violence treatment (physical, psychological, and social) by parents who accept *ngenger* or *ngenger* brokers.

This study examined from the perspective of Gender Anthropology. First, this study emphasizes that the PRTA is always "female-faced." This study explained with the background of socio-cultural settings to understand the reason why girls become domestic workers. Second, when parents decide that a daughter must follow *ngenger* culture, then the child will experience

exploitation. Thirdly, this study focuses on children who work as domestic workers by focusing on their experiences when experiencing forms of exploitation. This Gender Anthropology Perspective uses feminist theories with "socio-cultural settings" (Harding, 1987; Griffiths, 2001; Moore, 1988; Williams, 1998).

The purpose of this study is to explain the culture of *ngenger* in Javanese culture that has an impact on child exploitation, and also studying the child's relationship with the *ngenger* recipient in Javanese culture.

MATERIALS AND METHODS

The problem of this research is the culture of *ngenger* in Javanese culture which has an impact on child exploitation. This study uses descriptive research with a qualitative approach (Miles & Huberman, 1984). There are four stages used in this study. The first stage is determining the location of the research purposively in the areas of Surabaya and Malang. Considerations taken are, first, residents of Surabaya and Malang (the city of Malang, Malang, and Batu) were very dependent on domestic workers. Second, these two locations are very rapidly developing new housing. Third, in these two locations, they have begun designing the protection of PRT/PRTA and the organizations. With the existence of these organizations, it can create the chance of decent jobs for PRT/PRTA and serves as a place to distribute the rights of PRT/PRTA as human beings, women and workers.

The second stage is data collection. In collecting data, observations were made to find forms of exploitation of *ngenger* children and *ngenger* relationships with parents of recipient in Javanese culture. In addition to observations, Focus Group Discussions (FGD) on forms of child exploitation in the ngenger culture was also done to see the role of the Office of Social Affairs, National Population and Family Planning Board (BKKBN), Women and Child Protection (KBPPPA DINSOS), Child Protection Institution (LPA) East Java Society and Development Assessment Institute (LPKP), SIWI community, and community leaders on this issue.

The third stage is an in-depth interview with sixteen informants, with details of five *ngenger* informants in Surabaya and Malang, four informants from the parents of *ngenger* and five informants from the parents of the recipient of *ngenger*. Life history approach (Reinharz, 1992; Wengraf, 2001; Yin, 2014), addressed to five child informants and four informants from the parents of the *ngenger* children. Therefore, this study adopted a qualitative method to obtain a detailed report on the life journey of *ngenger* children and about the problems they faced and and the treatment of the recipient's parents against them (Bailey, 2009; Babbie, 2010) through an interactive process without gaps between researchers and the informants studied (Halfacree & Boyle, 1993; Venny, 2006). The treatment of recipient's parent to a *ngenger* child can be seen as a process, and not an event. Thus, this study observed the whole process of becoming a *ngenger* child in the context that shapes the before and during the process of *ngenger*, to gain insight into the parent's recipient treatment who carried out the exploitation. By doing so, it can illustrate the complexity of the actions of the *ngenger* child during the process.

The last stage is data analysis. The collected data is then classified and

identified based on the theme and then analyzed.

RESULTS AND DISCUSSION

In Java, Indonesia, prospective PRTA are known as *ngenger* (Prawiroatmojo, 1957; Sulistya, 2006), *nyuwita* (Moertono, 1985), *budak, abdi, rewang* or *emban, batur* and *babu* (Dwiyanto, Djoko & Kartodirjo, 1999). Since when did the *ngenger* culture actually begin? The limitations of literature on culture are very difficult to ascertain the culture. It seems that the ngenger culture has long occurred in Javanese culture, before the era of Dutch East Indies colonial government. The culture of *ngenger*, has been a part of Javanese culture for centuries which is very difficult to ascertain when this culture developed (Wangsitalaya, 1999). It seems that the *ngenger* culture is thought to exist since time immemorial.

Ngenger in Javanese refers to the domestic services of a child in another family's house which generally has a higher social status, and this culture rooted in feudal habits (Human Rights Watch, 2012). In return as an expression of gratitude, the child involved will do household work (Human Rights Watch, 2009). *Ngenger*, by some Javanese, aimed to get the higher rank by learning and become someone's pupil. The term learning is not in the narrow sense of teaching-learning activities at school, but rather looking for life experiences from others.

According to the ILO (2004), *ngenger* is a Javanese tradition in the form of entrusting underprivileged children to more prosperous families, be it people who still have family relations or not. The child who becomes *ngenger* gets financial help in life and education for a better future. In return, the child must help with the household work in the family he followed.

Regarding the culture, the dedication of girls and women as workers to their employers also occurs within the black race. Black girls and women are exploited without getting paid for domestic work. This case then adopted in a movie under the title 12 Years A Slave (McQueen, 2013) and The Birth of A Nation (Parker, 2016).

The data from ILO (2013) explains that there are 67 million domestic workers scattered in the world. From these data, 83 percent of them are women. While in Indonesia, according to the National Labor Force Survey (Sakernas) in 2013 there were 2.555.000 of PRT, including PRTA. In 2015, the number increased to 4.034.290 people. Of these, 74 percent are women. Whereas based on the survey conducted by the ILO in Jakarta in 2016, there are 4.5 million local domestic workers working in the country. This amount will increase along with the level of economic growth in Indonesia. ILO data are the results of a study of the estimated domestic workers' population based on Sakernas data that summarized in a report entitled Toward A Better Estimation of Total Population of Domestic Workers in Indonesia (ILO, 2017). The increasing number of PRT means that there is a tendency that the presence of PRT including PRTA is needed. For women, the culture *ngenger* become a separate employment field that absorbs a lot of labor.

The condition of *ngenger* children is a condition that still has not been known to others, therefore, people rarely pay attention to the problem of PRTA as a marginal group. Besides, the issue of *ngenger* children is less marketable for public consumption and some people

even consider *ngenger* culture as a form of protection for PRTA even though it is not.

In general, *ngenger* children still have close family relations even though they work as domestic workers. In some cases, the children continue to be treated as relatives and not get paid. There is also a situation where the family's recipient of *ngenger* doesn't have family relations but the family still committed to helping *ngenger* children. Thus, *ngenger* culture is expected as the way to cover the financial and educational needs of the children for their future.

Regarding the problem of why recipient's parent of ngenger tend to choose "female-faced" worker, an informant named Winy (18 years old) said that parents' recipient of ngenger children considers girls to be their PRTA because girls are more manageable, not demanding, and can be paid less.

Regarding the wages earned by Winy, she did not understand the details of her wages. According to her, the tuition fees also included in the wages given by the recipient's parents. It has been stated at the beginning of the agreement, that the recipient's parents of ngenger allow her to study with the tuition fee that includes in her wages.

> *"Uang kuliah termasuk digaji itu, kayak buku atau keperluan kuliah yang lain juga dibelikan. Apa ya, semacam uang jajanlah. Saya dikasih Rp. 300.000,- perbulan"* (Winy).
>
> *"Tuition is included in the wages, while college-related needs such as books and others are also given to me through some kind of pocket money and I got Rp 300.000,- per month."* (Winy)

The informant does not know the actual wages that she should be earned. The wages are deducted from the tuition fees and the amount received is Rp 300.000 per month as pocket money. There are no more bonuses, except for two sets of clothes that the informant received when Eid holiday.

Unlike Aisyah (16 years old). The wage system applied by the recipient's parents is not being given every month but is saved by the recipient's parents. Thus, if she wants to buy something or use the money for something, the informant needs to ask the recipient's parent.

The wages earned by Aisyah is actually Rp 600.000 per month, but it is not fully taken since the informant is not wasteful in spending her money.

> *"Tapi kalau saya lagi butuh ya saya minta ke ibu, untuk beli pakaian atau ngirim uang ke orang tua."* (Aisyah)
>
> "But if I need the money, for instance, to buy clothes or send some money to my parents, then I will ask my mother." (Aisyah)

The lowest wage was earned by Rina (12 years old). Her wage is Rp 300.000. This wage was received by Rina herself and was not given to her mother. As conveyed by the informant's mother:

> *"Bisa buat dia jajan sendiri. Kalau saya yang ngasih Cuma dua ribu tiga ribu. Kadang kalau nggak ada malah nggak."* (Rina)
>
> "The money can be used for her own pocket money. If I give her, I can only give two thousand or three thousand. If I don't have any money, I can't give any." (Rina)

The work done by Rina was only around cleaning the yard, sweeping, and tidying the garden. It was all done after she went home from school at 14.00 WIB. She didn't do the heavy and difficult work because she was still a child.

Another informant named Romadona or familiarly called Dona, has been a child domestic worker since she graduated from elementary school. Dona is eager to continue her study to a higher education level but has financial constraints. Thus, the solution she can take is by becoming *ngenger* so she can continue to study.

According to Dona, the time to rest given by recipient's parent was not enough or almost none. However, accompanying a toddler to sleep or play is considered as resting for her. In other words, Dona is a fulltime PRTA since she doesn't even get the holiday. Personally, it is not her own will since she also wants to get some holidays and do her school homework at her friend's house. The problem is that she doesn't have the courage to tell her recipient's parent. On the other hand, the recipient's parents often invite Dona to go on vacation with the family.

Dona's current wages is Rp 500.000 per month. The first time she worked as *ngenger*, the wages received by Dona was only Rp 200.000 per month. Now her wages have risen since two months ago. In addition, when Eid holiday, she only gets new clothes and not given the additional wages by the recipient's parent.

Dona was treated well by the recipient's parents, but sometimes they insinuated, such as saying that Dona is lacking in paying attention to the employer's child, her work was wrong, or even sometimes the parents were indifferent. Because of this treatment, Dona actually did not feel at home but was reluctant to convey it to the recipient's parents.

The informants' statements above support the previous explanation. The recipient's parents of *ngenger* tend to choose a female as a domestic worker because their wages are lower (lower bound), around Rp 300.000 to Rp 600.000 per month. PRTA wage value is lower than the wage of the adult domestic worker, which is around Rp 1.000.000 per month. The difference in wage determination is influenced by the number and the length of work experience. For example, an adult domestic worker who is experienced has a higher wage, so the upper bound of adult domestic workers' wages is also high. Therefore, domestic workers through the culture of *ngenger* do not have bargaining power, so they are unable to set higher wages. Inexperienced domestic workers such as PRTA, in the end, tend to be more obedient and not demanding, so they want to accept whatever wages the recipient's parents have set.

In addition, PRTA are anxious or afraid of saving their own money, so they prefer to save the money in the recipient's parent and only take the money when they need it. This condition is due to the lower bargaining power of PRTA compared to PRT. Generally, PRTA are more willing and braver to discuss the wage system.

Wages and workload received by children are a consequence of their choices and decisions to work as child domestic workers. In terms of workload, it appears that the work carried out by children does not require high skills even though the level of variation is high, so *ngenger* children don't have a bargaining position with the recipient's parent (Phillips & Taylor, 1980).

In addition to the lower amount of wages given to *ngenger* children, other problems also arise. PRTA only works at home which connoted as private domains. Thus, domestic work is often not considered a real work (Anggraeni, 2006; Irawaty, 2011). As a result, the rights of PRTA can be simply ignored by

the recipient's parent. PRTA do not even have access to a legal system that regulates all work and a social support system, which are actually their rights (Irawaty, 2011).

According to Pateman (1988) sexual division of labor creates gender-based job segregation and feminization of domestic work which results in a devaluation of this work. Finally, despite being commodified, this work is still considered a low socioeconomic value and "the dirty work" (Anderson, 2000).

Besides, PRTA is also supervised by the recipient's parent. For instance, almost every night Winy's bedroom is often checked by the recipient's parents. The examination of the bedroom is a form of parental supervision from the recipient's parents in order to prevent the possibility of ngenger children to be a "naughty" woman. According to Fechter (2007), the opinion of "checking" the PRTA's room was commonly done among middle-class employers in Jakarta. On the contrary, the strictness of supervision is not proportional to the rights that PRTA should get, but in reality, is not given, such as the right to get a higher wage or paid leave.

Another example of *ngenger* situation that supports the explanation comes from Aisyah, a Madurese *ngenger* and elementary school graduate who become *ngenger* child due to her parent's inability to pay for her tuition fee. Aisyah learned about Mrs. Fadhilah from her neighbor, while Aisyah personally did not know Mrs. Fadhilah. However, because of the economic pressure, Aisyah wanted to *ngenger* to Mrs. Fadhilah, even though Mrs. Fadhilah already had two adult domestic workers.

Aisyah's routines is to take care of Mrs. Fadhila's child, teach the employer's child, and help the other PRT or Mrs. Fadhilah's family member. Mrs. Fadlilah has a 5-year-old child, so every day Aisyah always bathes her, feeds her food, takes the child to pre-school class or playgroup and picks her up at 10.00 WIB. Arriving at home, Aisyah prepared herself to go to school. At night, she taught Mrs. Fadhilah's child to read.

As stated by Aisyah,

> *"Saya diminta tolong sama pembantu yang lain memanaskan makanan, terkadang disuruh ke pasar Wiyung berjarak kira-kira 1 km dengan berjalan kaki. Kalau Mbak (adik perempuan orang tua penerima ngenger) datang, kadang diminta tolong untuk membeli sesuatu di Indomart."*
>
> "I was asked for help by other domestic workers to reheat food. Sometimes they also asked me to the Wiyung Market on foot, which is about 1 km from the house. If *Mbak* comes (the sister of the recipient's parents), sometimes I am asked to help buy something at Indomart."

From the above description, PRTA is very easy to get asked for help from PRT or the other family members of recipient's parent. It can be said that PRTA is vulnerable to child exploitation. According to feminist economist Folbre (1994; 2004), she explains that "economics of care" is a job that seeks to help people meet their needs, such as taking care of children and helping them to learn. A job that is categorized as "economics of care" by Folbre is a domestic worker job. This work has historically been seen as worthless because it was unpaid work done by women and even paid less. For Folbre, taking care of children and helping them study are included as the "economics of care" that has important values for the

economy and is important for the sustainable development of humanity. This type of job requires more recognition. In the context of domestic work, it is important for PRT to be recognized as workers and in the employee-employer relations rather than "family" relations.

According to Romero (2000), the treatment of domestic workers (in this study are *ngenger* children) is related to the issues of status and hierarchy, where the family with higher hierarchical status demean the people who work as domestic workers. In this situation, employers often place their domestic workers as "an extension of themselves to do heavy jobs" compared to autonomous workers. The status hierarchy in the relationship between domestic workers and employers is often projected in the form of work orders and employer supervision of the work done by domestic workers. In this context, an unlimited workload often has to be done by domestic workers. Assigning certain jobs in certain situations to domestic workers by some employers, consciously or not, could mean the disclosure of the low status of domestic workers itself.

The inability of *ngenger* children in a bargaining position is also a problem that needs to be concerned. The weak bargaining position of *ngenger* children to determine working hours, the amount of wage, jobs, environmental conditions of work, rights, and responsibilities of workers and activities outside of personal work is due to their lack of knowledge of their rights and obligations as workers. This condition is worsened by the fact that those who are willing to work as *ngenger* come from a background of low social status, economics and low education (elementary or junior high school graduates), such as Winy, Aisyah, Rina and Dona. For girls, working as PRTA are the easiest choice compared to other jobs such as factory workers who are demanded to have a diploma, at least a junior or senior high school level. For indigent families, daughters are a solution to support the economic life of the family as a "feminization of survival" (Sassen, 2004). For them, being a *ngenger* child is probably a compulsion in the economic pressure and poverty, because that is the only job available that they can do.

According to Muryanti (2016), the education level of domestic workers is mostly elementary and junior high school. Some of them even not graduate from elementary and junior high school. Low education level and lack of skills have an impact on the limitations of domestic works they can do. In general, PRT works without adequate skills about domestic work itself. They merely do the work because, in their mind, women are socially constructed and obligated to do domestic work. Socially, domestic work also has a low stereotype to be recognized as a job. When hearing the word PRT, in general, society directly assume that domestic work is not the type of job that worth the money. Thus, PRT is automatically considered as the people with a low level in social status. The way society sees domestic worker is different compared to people who work outside the home, who is considered as a worker and respected more because they make more money and has social status.

Theoretically, PRT are also part of the labor because they provide paid services to complete domestic work. Eiler (2004) states that a laborer is someone who participates directly or indirectly in a production. They do not have the means of production so that in order to maintain

their lives they must sell their energy to be exchanged for wages. PRT get to this point because the only thing they can rely upon is their energy. Therefore, PRT are at risk to be involved in exploitation.

Even so, these indigent families still send their children to *ngenger* so that the children can contribute to easing the social and economic burden of the family. This reason is what encourages the indigent family to let their children *ngenger* and live separately from them as PRTA.

Ngenger is carried out based on the sincerity in following other families to get a decent living, knowledge, and politeness, which is considered as important values for the future. Basically, *ngenger* culture doesn't require wages. In the process of *ngenger*, a child must be sincere because he has been helped and protected to receive the lessons and experience provided by the recipient's parent. However, the fact shows that what *ngenger* children expect does not always fit the reality.

Why is there an element of exploitation from the Javanese *ngenger* culture? First, most of the PRTA are women. Second, there is an injustice to the rights received by PRTA even though their work is the same as other adult PRT. The thing that distinguishes PRTA and PRT is that PRTA does not get a clear wage. Third, in addition, PRTA do not get clear working hours, there are no work contracts, there are no standard wages and no holidays. Injustice and inconvenience to this situation cannot be avoided by PRTA because of high economic pressure. Hence, they must accept being placed in any recipient's family even if it is not in accordance with their wishes. On the contrary, the recipient's parents of *ngenger* are welcoming the existence of PRTA through *ngenger* culture, because the presence of PRTA can help to ease their domestic work, while the *ngenger* children can ease and fulfill the daily needs of their own families.

Why do the recipient's parents of *ngenger* prefer to make the children as their PRTA through the *ngenger* culture? According to them, PRTA is easier to manage, easy to educate, not demanding, and can play the role of friends for their children.

The recipient's parents always expect to get more than what they give to *ngenger* children. The recipient's parents feel that they have fulfilled their obligations, so in return, they deserve their rights. This expectation leads to the negative side of *ngenger*, which is children exploitation. The recipient's parents expect a high return from the children since they already given money and education, while in contrast, *ngenger* children don't get their rights, such as fix working hours, employment contracts, acceptable wage standards, and holidays. Therefore, it can be said that exploitation goes alongside the domestic work sector.

Basically, according to the Javanese people, the *ngenger* culture is to participate in learning and seeking a decent living from the people who are followed, so that in fact they do not mean that they are working as domestic workers (Romero, 1992; Anggraeni, 2006; Irawaty, 2011). In other words, the reciprocity of a child that projected in helping the recipient's family work is only a form of the child's devotion. Another fundamental difference between the actual *ngenger* and the domestic worker in Javanese culture is the existence of a relationship system between protectors and those protected. The relationship between the protector

and the protected child is a patron-client relationship.

The relationship between a *ngenger* child with the recipient's parent is a patron-client relationship. According to Scott (1983) and Burke (2015), in the social structure, the *ngenger* culture is characterized by differences in ownership of control over the status (status), power and wealth of the stratification system that underlies vertical exchange. The asymmetric relationship between the two creates a mutually beneficial reciprocal relationship. Patron has the responsibility to meet the needs of the client, and the client must provide his loyalty to his patron. In short, the recipient's parent is the patron, and *ngenger* child is a client.

The patron-client relationship in cultural context also exists in the culture of South Sulawesi. It is known from the study of Ahimsa (1988) entitled "Minawang", which explained by using the concept of patron-client owned by Scott (1983). Ahimsa explained how the relationship between *karaeng* and *anakaraeng* in Minawang illustrates the relationship between mutual needs. The *karaeng* and *anakaraeng* relations is not a rigid and lifelong relationship, but it can be stopped when both feel they have no longer benefited one another.

Scott (1983, p. 17-18) in his book The Resistance of Peasants, describes the form of patron-client is the exchange of relations between the two roles that are bound, where the relationship involves an individual with a higher socio-economic status (patron) using influence and resources power to provide protection, as well as the benefits for someone with a lower deems status (client). In return, the client offers any helps including personal services to his patron. As a pattern of exchanges spread, services and goods exchanged by client patrons reflect the needs and resources of each party.

According to Scott, the characteristics of patron-client relationships are based on inequality and flexibility that is spread as a personal exchange system. These characteristics are based on informal agreements. The difference in economic conditions and social status between the recipient's parents and *ngenger* children cause unequal relationships. The client needs social security from the patron due to the limitations he has. The *ngenger* child who has a disadvantaged condition feel the needs of protection. The recipient's parents of *ngenger* play a role as a party that provides protection, considering the child condition which is vulnerable and still needs better education.

The *ngenger* culture illustrated the pattern of patron-client relations between the parents of the recipient (patron) and children (client). Scott describes patron-client as a relationship with mutual needs. When the patron has power, he needs the client to be controlled. In this case, the patron gives his power so that the client feels protected. In return, the client feels responsible for what has been given by the patron and consciously gives reciprocity to the patron in the form of self-service. Patrons have a higher socio-economic status and more resources. Clients are those who have limited resources and do not have a high socio-economic status. Summary, patron-client relationships have a basic agreement by both parties, and the relationship is related to their respective social relations.

Both patrons and clients have logical consequences that result in the rights and obligations of each party. When in the

process *ngenger*, a child has a logical consequence where he must obey the recipient's parent of *ngenger*. Instead, the recipient's parents will provide a decent life, protection, and teaching the values of politeness so it can be useful for the children in the future.

The hope for mutual economic and social benefits between the two is done through an agreement. The agreement becomes one of the ties between the patron and the client in determining the obligation and the rights of both. In general, this agreement is carried out informally, by being socialized in the community through social values (Scott, 1983).

In this relationship pattern, the indigent, which characterized by a lack of income, relying on the patron in deciding their political choices (Mitlin, 2005). As indigent people, they make choices or decisions about everything based on the choice of patrons in order to get access to jobs, fulfillment of facilities or other resources. Patron-client relations are alliances of two groups of communities or individuals who are not equal, both in terms of status, power, and income. Thus, it places the client in a lower (inferior) position and patron in a higher position (superior) (Scott, 1983).

Patron-client relations are social relations at first. It started to change to be economic relations when capitalism developed in many aspects of human life. Since economic relations require profit and loss, the patron triggered to exploit the client to gain profits. The relationship between *ngenger* children and recipient's parents in Javanese culture is called a "father-son relationship," where the father builds an extended family with power and influence. In this context, the father must be responsible for his ownership and establish relations with his subordinates personally, not ideologically or politically (Jackson, 1981). It must be done so that the client can feel what the patron feels during the *ngenger* process.

The shift of social relations into economic relations has caused patron-client relations turned into unfair relationships and exploitation of children. This relation happens when ngenger children don't get the fulfillment of basic needs, protection, and good education, yet they still have to continue to be loyal to the recipient's parents.

Based on the data previously explained, each recipient's parent of ngenger pay a different amount of wages depending on the type of work and the family members of the recipient's parent. However, the type of work and family members of the recipient's parents do not have a significant effect on the amount of the wages given to PRTA. Instead, the amount of wages given is not based on generosity but the workload, and wage standards followed by the recipient's parents. The recipient's parent determines the working hours, the rewards obtained, and the type of work that must be done by *ngenger* children. It has been explained by Marx (2008, p. 17):

> *"Despite the variety of their statements, they would all agree upon one point: that wages are amount of money which the capitalist pays for a certain period of work or for a certain amount of work. Consequently, it appears that the capitalist buys their labor with money, and that for money, and that for money they sell him their labor. But this is merely an illusion. What the actually sell to the capitalist for money is their labor-power. This labor-power the capitalist buys*

> *for a day, a week, a month, etc. And after he has bought it, he uses it up by letting the worker labor during the stipulated time. With the same amount of money with which the capitalist has bought their labor-power (for example, with two shillings) he could have bought a certain amount of sugar or of any other commodity".*

The act of obedience from a *ngenger* children creates a potential for the exploitative circumstance. *Ngenger* children cannot refuse when the parents ask them to do extra work. They also consider the extra work as an obligation that must not be refused. On the contrary, their overtime pay is given as pocket money and is not clearly paid by the recipient's parent. The parent's recipient only considers the pocket money as a token of gratitude, while *ngenger* children consider pocket money as a "fortune". This circumstance shows that *ngenger* children are actually experiencing subordination and exploitation. In short, the children are at the lowest level of the system, so they are alienated from the work itself.

Many women from upper-middle-class families take advantage of the international division of reproductive labor through the *ngenger* culture (Parenas, 2015) and the feminization of domestic workers by employing them as cheap laborers, can be demanded to do many things, caring workers, and as people who can mingle and can be treated as part of the family (fake kinship) (Enloe, 1990; Anderson, 2000; Irawaty, 2011). In fact, this *ngenger* culture is actually hiding the fact that their working conditions are bad, full of exploitation, underpaid, and very strict to the point where they must always be available 24 hours a day, without a clear boundary as workers and their working relationships with the recipient's parent (employer) (Lan, 2006; Enloe, 1990; Constable, 2007).

Indigent families who live in rural areas (Vittachi, 1989) choose to work for wealthy families in urban areas or around their home. The family member who works as a domestic worker will also bring their child along to the workplace due to several reasons. First, they can monitor their children while working at the same time. Second, the child's need for food can be fulfilled, and it also helps to ease the economic burden of indigent families. Third, the domestic worker expects the employer's attention on their child, so that the employer can pay for the child's tuition fee. Fourth, they expect the employer to give a work opportunity to their child. From this circumstance, the child already become a domestic worker through *ngenger*.

CONCLUSION

Based on the results of the study, it can be concluded that *ngenger* children as domestic workers fall under the criteria of exploitation and almost loses all of their rights as children. The exploitation forms of *ngenger* children are underpaid or low wages, do not have bargaining power, more obedient and less brave to claim their rights, do not dare to complain to anyone, and do not have work limit so they must continue to serve the recipient's parents, such as buying food outside, giving massage, and so on. The workload that children receive is a consequence of their choices and decisions to work as PRTA. In terms of workload, the work done by children does not require high skills even though the types of the works are varied. Therefore, the *ngenger* children do not

have a bargaining position against the recipient's parents. *Ngenger* children who seem to be protected by parents, in fact, are experiencing child exploitation. A child's relationship with a recipient's parent is a patron-client relation. The patron-client relation is a reciprocal relationship that is mutually beneficial. The recipient's parent of *ngenger* as a patron has the responsibility to fulfill the needs of the child as a client, and in return, the client must give his loyalty to his patron. Patron-client relations contain economic relations, where there must be profits achieved, so exploitation must be done to gain the benefit. In fact, *ngenger* children actually do not get the fulfillment of basic needs, protection, and good education, but they still continue to be loyal to the recipient's parents. This circumstance is what makes the relationship in *ngenger* culture an unfair and exploitative relationship.

IMPLICATION AND SUGGESTION

The beginning of domestic workers in Java, Indonesia, known as *ngenger* (Prawiroatmojo, 1957; Sulistya, 2006), relates to local or domestic needs (Irawaty, 2011; Gutierrez-Rodriguez, 2009). In general, *ngenger* children are girls from rural areas who are entrusted to someone in the city, as a result of structural poverty. *Ngenger* children's jobs are doing housework, taking care of and even teaching the children of the recipient's parents. The recipient's parents of *ngenger* feel that they have fulfilled their obligations such as paying for tuition fee, teaching politeness values, and even fulfilling their food and clothing needs so, in return, the parents feel entitled to demand reciprocity from what they have given. As a result, it can lead to exploitation.

Therefore, the provincial and regional governments (especially the Provincial Government of Surabaya) who in charge of children issue will include the issue of child labor and child domestic workers' protection that projected in "ngenger children" in the draft regulation on the fulfillment of children's rights by carrying out the process of returning the child domestic workers' needs of learning and playing. Therefore, the community is also expected to help the government in mapping the issue of *ngenger* culture that has grown in Surabaya and Malang City.

LIMITATIONS

In the research process of the PRTA exploitation through *ngenger* culture, the researcher faced many difficulties. First, the *ngenger* children issue is a problem in one's household, so it cannot be intervened by the researcher. The researcher also had a hard time to approach the *ngenger* child due to a privacy constraint. Second, in the process of collecting data through in-depth interviews with *ngenger* children, researchers found it difficult to organize the interview since the children were under the strict supervision by the parents of the recipient. Third, the people around the housing are generally less sensitive to the existence of *ngenger* children at the household. Fourth, the culture of *ngenger* in Javanese culture is considered normal because it is seen as a form of protection and assistance to the child. The solution made by researchers to deal with these obstacles is to become active participants in various activities, for example, participating in housing activities to record the number of *ngenger* children. After obtaining the data, the researcher conducted the interviews in various places such as at

school, at the market, or when the recipient's parents were not home.

ACKNOWLEDGEMENTS
This research was supported by the Ministry of Research, Technology and Higher Education Indonesia.

REFERENCES

Ahimsa, H. S., (1988). *Minawang: Hubungan patron klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aisyah (2017). [Personal communication]. 27 June.

Ally, S. (2011). Domestics, 'dirty work' and the affects of domination. *South African Review of Sociology*, 42(2), 1-7.

Anderson, B. (2000). *Doing the dirty work: The global politics of domestic labour*. London & New York: Zed Books.

Anggraeni, D. (2006). *Dreamseekers: Indonesian women as domestic workers in Asia*. Equinox, Jakarta, Singapore.

Bailey, A. J. (2009). Population geography: Lifecourse matters. *Progress in Human Geography*, 33(3), 407-418.

Vittachi, A. (1989). *Stolen Childhood: In a search of the rights of the child*. Cambridge: Polity Press.

Babbie, E. R. (2010) "The Logic of Sampling", *The Practice of Social Research, 12th edition*. Wadsworth Cengage Learning, Belmont.

Burke, P. (2015). *Sejarah dan teori sosial, edisi kedua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Constable, N. (2007). *Maid to order in Hongkong: Stories of migrant workers*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Dona (2017). [Personal communication]. 23 June.

Dwiyanto, Djoko, & Kartodirjo (1999). *Pekerja rumah tangga dalam analogi sejarah. EMPU Edisi No. 3 Th. II. 1999*. Yogyakarta: Yayasan Tjoet Njak Dien.

Eiler, T. (2004). *Bagaimana membangun serikat*. Lapera Pustaka Umum, Yogyakarta.

Enloe (1990). *Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press.

Espinosa, S. A. (2016). Diaspora philanthropy: The making of a new development aid?. Routledge, 5(3), 361-377.

Fechter, A. M. (2007). *Transnational lives: Expatriates in Indonesia*. Hants: Ashgate, Aldershot.

Folbre, N. (1994). *Who pays for the kids?: Gender and the structure of constraint*. London and New York: Routledge.

Folbre, N. (2009). *Greed, lust & gender: A history of economic ideas.* Oxford University Press, Oxford.

Gribble, C. & Tran, L. T. (2016). "Connecting And Reconnecting With Vietnam: Migration, Vietnamese Overseas Communities And Social Media". *The Asia – Pacific in The Age of Transnational Mobility: The Search for Communityand Identity on and through Socoal Media.* UK and USA: Anthem Press.

Griffiths, A. (2001). Gendering Culture: Toward a Plural Prespective on Kwena Women's Rights. In: J. K. Cowan, M. B. Dembour, & R. A. Wilson (eds.). *Culture and Rights Rights: Anthropological Perspectives.* Cambridge University Press.

Gutierrez-Rodriguez, E. (2009). *Migration, domestic work and affect.* London and New York: Routledge.

Halfacree, K. H. & Boyle, P. J. (1993). *The Challenge Facing Migration Research: The Case for a Biographical Approach.*

Harding, S. (1987). *Feminism and methodology: Social science issues.* Indiana University Press, Bloomington.

Human Rights Watch (2009) *World Report 2009: Events of 2008.* The United States of America: Human Rights Watch.

Human Rights Watch (2012) *World Report 2011: Events of 2011.* The United States of America: Human Rights Watch.

Irawaty, D. (2011). *Redefining cultural practices and recontructing a colonial legacy: Foundation for female household workers 'empowerment in Indonesia.* Berlin: Dr Verlaag.

ILO (2004). *Bunga-bunga di atas Padas: Fenomena Pekerja Anak Rumah tangga di Indonesia.* Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional.

ILO (2013). *Technical report: The estimation of total domestic workers in Indonesia.* Jakarta: ILO.

ILO (2017). *Toward a better estimation of total population of domestic workers in Indonesia.* Jakarta: ILO.

Marx, K. (2008). *Wage-Labor and Capital.* Maryland: Wildside.

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of organizational behavior, 2*(2), 99-113.

McQueen, S. (dir) (2013) *12 Years A Slave.* DVD, Regency Enterprises, USA.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A source book for new methods.* Sage Publication Inc, Beverly Hills CA.

Mitlin, D. (2005) . Understanding chronic poverty in urban areas. *International Planning Studies*, 10(1), 3-19.

Moertono, S. (1985). Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, abad XVI sampai XIX. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Moore, H. (1988). *Feminism and Anthropology*. USA: University of Minnesota.

Moertono, S. (1985). *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muryanti (2016). *Formalisasi semu: Bentuk hubungan kerja kerumahtanggaan di Yogyakarta.* Disertasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Oommen, G. Z. (2014). South Asia–Gulf migratory corridor: Emerging patterns, prospects and challenges. New Delhi: Nehru Memorial Museum and Librar.

Othman, S. A. & Rahim, R. A. (2014). Migrant workers in Malaysia: Protection of employers. *Pertanika Journal* **Social Sciences & Humanities**, 22(S), 271-282.

Parreñas, R. S. (2015) *Servants of Globalization: Migration and Domestic*. Stanford: Standford University Press.

Pateman, C. (1988). *The Sexual Contract.* Standford University Press, Stanford.

Phillips, A. & Taylor, B. (1980) Sex and skill: Notes towards a feminist economics. *Feminist Review*, 6.

Lan, P. C. (2006). *Global Cinderellas: Migrant Domestics and Newly Rich Employers in Taiwan.* Durham and London, Duke University Press.

Prawiroatmojo (1957). *Kamus Bahasa Jawa Jilid I, Bausastra Jawa-Indonesia.* Jakarta: CV Haji Masagung.

Parker, N. (dir) (2016). *The Birth of A Nation.* DVD, Bron Studios, USA.

Parreñas, R. (2015). *Servants of globalization: Migration and domestic work.* Stanford University Press.

Reinharz, S. (1992) "Feminist Case Studies". *Feminist Methods in Social Research.* Oxford University Press, New York, p. 164-175.

Rina (2017). [Personal communication]. 7 July.

Romero, M. (1992). *Maid in the U.S.A.* Routledge, New York & London.

Romero, M. (2000) Bursting the foundation myths of reproductive

labor under capitalism: A call for brave new families or brave new villages?. *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 8, p. 177-195.

Ruhm, C. J. (2011). Policies to assist parents with young children. *The Future of Children*, 21(2), p. 37-68. Published by: Princeton University.

Sassen, S. (2004). *Global Cities and Survival Circuits*. In: B. Ehrenreich & A. R. Hochschild (eds.). Global Woman, Metropolitan Books, New York.

Scott (1983). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sulistya, T. E. (2006). *Karakteristik Pendidik Informal Model Nyantrik*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Sebelas Maret.

Venny, A. (2006) Pentingnya metodologi feminis di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 48, p. 4-5.

Verwiebe, R., Reinprecht, C., Haindorfer, R., & Wiesboeck, L. (2017). How to succeed in a transnational labor market: Job search and wages among Hungarian, Slovak, and Czech Commuters in Austria. *International Migration Review*, 51(1), 251-286.

Waldfogel, J. & McLanahan, S. (2011). Work and family: Introduction the issue. *The Future of Children*, 21(2), p. 3-14.

Wangsitalaya (1999). "Perempuan, Kerja dan Pekerja Rumah Tangga", dalam *Profil Sosial dan Problematika Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan Tjoet Njak Dien-Pact-INPI.

Wengraf, T. (2001). *Qualitative Research Interviewing: Biographic Narrative and Semi-Structured*.

Williams, J. (1998). *Don't They Know It's Friday? Cross-Cultural Considerations for Business and Life in the Gulf*. Dubai: Motivate Publishing.

Winy (2017). [Personal communication]. 5 August.

Wong, D. F. K., Li, C. Y., & Song, H. X. (2007) Rural migrant workers in urban China: Living A marginalised life. *International Journal of Social Welfare*, 16, 32-40.

Yin, R. K. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282.

Gmail Telusuri email

Tulis

Kotak Masuk 98
Berbintang
Ditunda
Penting
Terkirim
Draf
Kategori
Sri +

Tidak ada chat terbaru
Mulai yang baru

Dear Dr. Kinasih:

Your manuscript entitled "Exploitation of Child Domestic Workers thro
presently being given full consideration for publication in International

Co-authors: Please contact the Editor-in-Chief Office as soon as poss

Your manuscript ID is ISSJ-OF-2018-169

Please mention the above manuscript ID in all future correspondence
ScholarOne Manuscripts at https://mc.manuscriptcentral.com/issj and

You can also view the status of your manuscript at any time by check

Please also be advised that while at present International Social Scie
agreement with publisher Wiley, should their article be accepted for p

Thank you for submitting your manuscript to International Social Scie

Sincerely,
International Social Science Journal Editorial Office

Balas Balas ke semua Teruskan

Lampiran 2. Model Kerja Layak PRT